

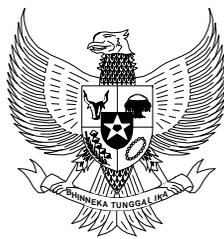
RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI RIAU
2014-2019**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI RIAU
Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru**

**PEKANBARU
TAHUN 2014**



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU NOMOR : Kpts. 784 / XI / 2014

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, rancangan akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau Selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan telah diverifikasi oleh Bappeda Provinsi Riau, meliputi:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Dinas Kesehatan;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan;
7. Dinas Perhubungan;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Dinas Bina Marga;
10. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air;
11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Dinas Pemuda dan Olahraga;
13. Dinas Pendapatan;
14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
16. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
17. Dinas Pertanian dan Peternakan;
18. Dinas Kehutanan;
19. Dinas Perkebunan;
20. Dinas Perikanan dan Kelautan.
21. Inspektorat;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Penelitian dan Pengembangan;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Badan Lingkungan Hidup;
26. Badan Ketahanan Pangan;
27. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
28. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
29. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

30. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
31. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
32. Badan Penghubung;
33. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
34. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
35. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
36. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
37. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan;
38. Sekretariat Korpri;
39. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
40. Satuan Polisi Pamong Praja;
41. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad;
42. Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi;
43. Rumah Sakit Jiwa Tampan.

- KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun rancangan Rencana Kerja untuk setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang saat ini belum diberlakukan, maka penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan setelah pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2014.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2014.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 21 November 2014

**PLT. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR**

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014-2019 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Bappeda dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis bidang perencanaan, tujuan pelayanan jangka menengah SKPD, sasaran pelayanan jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan.

Selanjutnya Rencana Strategis yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Bappeda hingga tahun 2018 yang akan datang.



Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra ini, terutama kepada seluruh staf Bappeda yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh rangkaian penyusunan Renstra dapat dilaksanakan dengan baik.

Pekanbaru, Desember 2014

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI RIAU**
Kepala,

M. Y A F I Z
Pembina Utama Madya
NIP : 195606011978081002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI RIAU	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Riau	8
2.2. Sumberdaya Bappeda Riau.....	14
2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Riau	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan BAPPEDA Provinsi Riau	52
BAB III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	54
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Riau	54
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	56
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	59



3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	61
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis	65
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN		
		67
4.1.	Visi dan Misi Bappeda Provinsi Riau.....	67
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Riau	69
4.3.	Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Riau.....	71
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF		
		75
BAB VI : INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI RIAU MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI RIAU 2014-2018.....		
		120
BAB VII : PENUTUP		
		122
LAMPIRAN.....		
		123



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2013.....	14
Tabel 2.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Provinsi Riau Menurut Jabatan Tahun 2013.....	15
Tabel 2.3.	Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013	17
Tabel 2.4.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Provinsi Riau Menurut Pendidikan Penjurangan Tahun 2012	18
Tabel 2.5.	Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) Bappeda Provinsi Riau	19
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Prov. Riau.....	22
Tabel 2.7.	Review Ketercapaian Program Bappeda 2009-2013	24
Tabel 2.8.	Jumlah Kebutuhan Aparatur Perencana Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.....	50
Tabel 2.9.	Jumlah Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang Telah Memiliki Sertifikat Perencanaan Dasar Maupun Sertifikat Fungsional Perencana.....	51
Tabel 2.10.	Ketersediaan Data Dasar Pada Bappeda Provinsi Riau	52
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56



Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Provinsi Riau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2014-2019.....	59
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota.....	61
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	63
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA	70
Tabel 4.2.	Formulasi dan Perhitungan Indikator.....	71
Tabel 4.3.	Matrik SWOT	72
Tabel 4.4.	Startegi dan Arah Kebijakan.....	73
Tabel 5.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Provinsi Riau.....	78
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	121

LAMPIRAN

Tabel 1.	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Riau terhadap Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten/Kota dan Renstra Kemendagri serta Kemen PPN/Bappenas	123
Tabel 2.	Hasil Telaahan Struktur Pola dan Ruang Wilayah Provinsi Riau Terhadap Kinerja Pelayanan	



	Bappeda Provinsi Riau	124
Tabel 3.	Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Riau Terhadap Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Riau	125
Tabel 4.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	127
Tabel 5.	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	129
Tabel 6.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Provinsi Riau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2014-2019	130
Tabel 7.	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas dan kemendagri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	131
Tabel 8.	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	132
Tabel 9.	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	133
Tabel 10.	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau	



	berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	134
Tabel 11.	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	136
Tabel 12.	Skor Penilaian	136
Tabel 13.	Skor Penetapan Isu Strategis	136
Tabel 14.	Nilai Skala Kriteria Terhadap Isu Strategis	136
Tabel 15.	Perumusan Perwujudan Visi.....	139
Tabel 16.	Perumusan Visi.....	141
Tabel 17.	Penyusunan Penjelasan Visi.....	142
Tabel 18.	Perumusan Misi.....	143
Tabel 19.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	144
Tabel 20.	Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Bappeda Provinsi Riau	145
Tabel 21.	Penentuan Strategi.....	146
Tabel 22.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	147
Tabel 23.	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	148



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Keadaan Golongan Ruang Gaji Pegawai Negeri Sipil Bappeda Provinsi Riau	15
Gambar 2.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/ Esselonering	16
Gambar 2.3.	Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Bappeda Provinsi Riau	17
Gambar 2.4.	Tingkat Pendidikan Penjenjangan Pegawai Negeri Sipil Bappeda Provinsi Riau	18



1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana strategis (RENSTRA) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumberdayanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra menyajikan agenda utama pembangunan untuk mengantisipasi permasalahan dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan akan timbul sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan yang semakin kompleks.



Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), lintas-batas antardaerah/antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, masalah tenaga kerja serta masalah lainnya.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi kedepan. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan di daerah, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut, peran Bappeda sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan di daerah dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana pemerintah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.



Menyadari akan hal tersebut sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam menyusun Rencana Strategis (**Renstra**) yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk periode 5 (lima) tahunan juga berpedoman pada RPJMD 2014-2018, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra BAPPEDA Provinsi Riau Tahun 2014-2018 berdasar pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan



- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara, Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019.
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra BAPPEDA Provinsi Riau Tahun 2014–2018 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf BAPPEDA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
3. Kerangka dasar bagi BAPPEDA Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Mensinergikan seluruh kemampuan dan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya dalam menjawab tuntutan perkembangan pembangunan berdasarkan tatanan regional, nasional maupun global.



5. Memudahkan aparaturnya BAPPEDA Provinsi Riau dalam mencapai tujuan pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur dan bertanggung jawab.

Adapun Tujuan Penyusunan RENSTRA ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
2. Tersusunnya rencana program dan kegiatan yang berbasis pengendalian dan evaluasi yang berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan;
3. Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan visi, misi, tujuan dan strategi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA;
- 2.2 Sumber Daya BAPPEDA Provinsi Riau dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Riau;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA.



BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi BAPPEDA
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA
- 4.3. Strategi dan Kebijakan BAPPEDA

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2. Indikator Kerja

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP



GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI RIAU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Riau

Adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) mendorong Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-masing daerah. Konsekuensi dari hal tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14, ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah



Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang harus dilaksanakan, yaitu urusan kordinasi penyelenggaraan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Riau Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, menyebutkan bahwa BAPPEDA Provinsi Riau mempunyai tugas dan fungsi :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi
2. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi
3. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi
4. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;



5. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
6. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
7. perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, regional, nasional, internasional dandunia usaha;
8. pengendalian perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
9. perencanaan dan pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup;
10. pengkoordinasian data statistik dan informasi pembangunan daerah;
11. evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan penyiapan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan;
12. pembinaan ketatausahaan dan perencanaan internal BAPPEDA;
13. melakukan pembinaan terhadap pejabat fungsional perencana;
14. pengkoordinasian penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Priotas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
15. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada uraian tugas dan fungsi, pelaksanaan pelayanan kinerja Bappeda mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai **(1) pengambil kebijakan/keputusan di bidang Perencanaan** (*policy maker*), **(2) koordinator** (*coordinator*), **(3) Lembaga Pemikir/Kajian/Evaluasi Kebijakan Pembangunan** (*think-tank*), dan **(4) administrator** (*Administration*). Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai **pengambil kebijakan/keputusan di bidang perencanaan**, Bappeda menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Untuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya/plafon pagu anggaran sementara (PPAS). Selain tugas



perencanaan tersebut, Bappeda juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (climate change).

Sebagai **Lembaga Pemikir/Kajian/Evaluasi Kebijakan Pembangunan**, Bappeda melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Sebagai **koordinator**, Bappeda antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari Gubernur seperti penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan daerah, dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama Dinas/Badan (SKPD) terkait; serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.

Selanjutnya sebagai **administrator**, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan termasuk bantuan keuangan kepada pemerintah kab/kota; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan. Selama periode 2009-2013, pelaksanaan keempat peran tersebut telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan pelaksanaannya baik di Kabupaten dan Kota maupun dengan pemerintah pusat. Terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan global, dan antisipasi terhadap menurunnya dana bagi hasil minyak bumi akibat



menurunnya produksi minyak bumi di Riau, fluktuasi harga bahan bakar minyak, yang mempengaruhi daya beli rakyat, Bappeda dituntut untuk antisipatif dan proaktif serta mampu mengembangkan sistem pendeteksian dini (*early warning system*) sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional tetap terjamin.

2.1.2. Struktur Organisasi

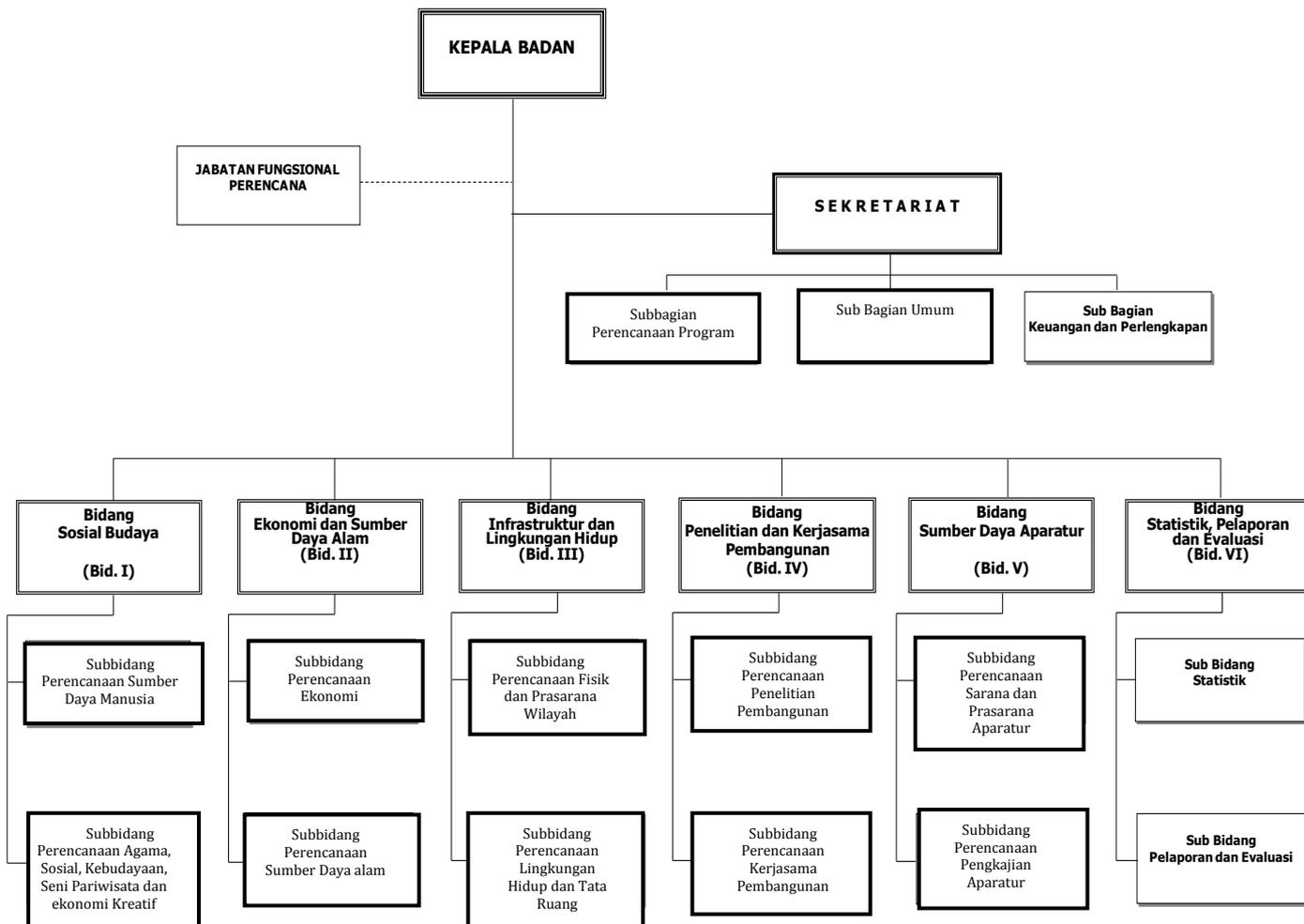
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau didukung oleh 152 Pegawai Negeri Sipil dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Agama, Sosial, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam.
- e. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
- f. Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Penelitian Pembangunan;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan.



- g. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pengkajian Aparatur.
- h. Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Statistik;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



2.2. Sumber Daya Bappeda Riau

2.2.1. Sumberdaya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, didukung dengan 152 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan perincian sebagai berikut:

a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Gaji.

Berdasarkan data pada tabel 1.1. diketahui bahwa Pegawai negeri Sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 103 orang atau 67,76%, sedang golongan ruang gaji terkecil adalah golongan I yang berjumlah 2 orang atau 1,32%.

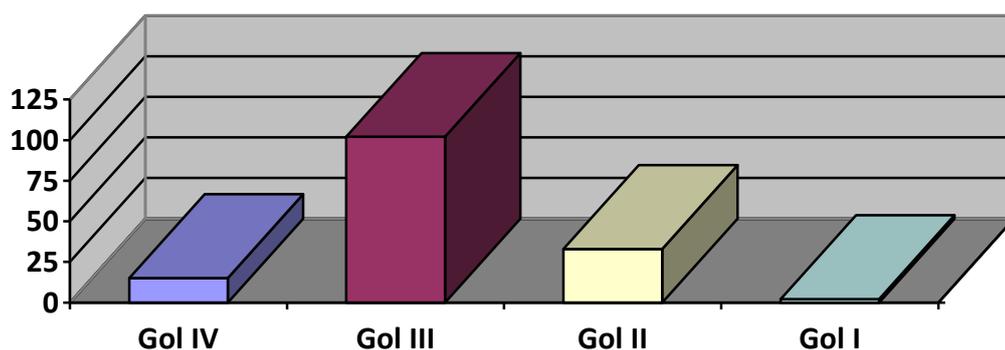
Tabel 2.1
Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2013

NO.	GOLONGAN RUANG GAJI	JUMLAH	%
1.	Gol. IV	15	9,21
2.	Gol. III	102	67,76
3.	Gol. II	33	21,71
4.	Gol. I	2	1,32
JUMLAH		152	100,00

Sumber : sekretariat Bappeda Prov. Riau Tahun 2013

Secara sederhana kondisi Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang gaji dapat dilihat gambar berikut ini.





Gambar 2.1. Keadaan Golongan Ruang Gaji Pegawai Negeri Sipil Bappeda Provinsi Riau Tahun 2013

b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/ Esselonering.

Pegawai Negeri Sipil Bappeda Provinsi yang berjumlah 152 orang, berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam 4 (empat) kelompok sebagaimana data pada tabel 1.2 berikut ini.

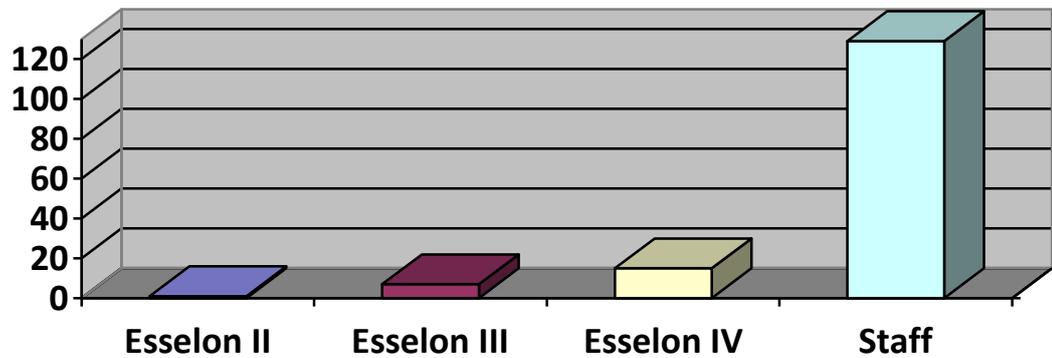
Tabel 2.2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Provinsi Riau Menurut Jabatan Tahun 2013

NO.	JABATAN/ESELON	JUMLAH	%
1.	Eselon II	1	0,66
2.	Eselon III	7	4,64
3.	Eselon IV	15	9,27
4.	Staf/Non Struktural	129	85,43
JUMLAH		152	100,00

Sumber : Sekretariat Bappeda Prov. Riau Tahun 2013



Secara sederhana gambaran Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau menurut Jabatan/Esselon dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 2.2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/ Esselonering Tahun 2013

c. Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal.

Dari data pada tabel 1.3 diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S.1) yang berjumlah 67 orang atau 39,07%.

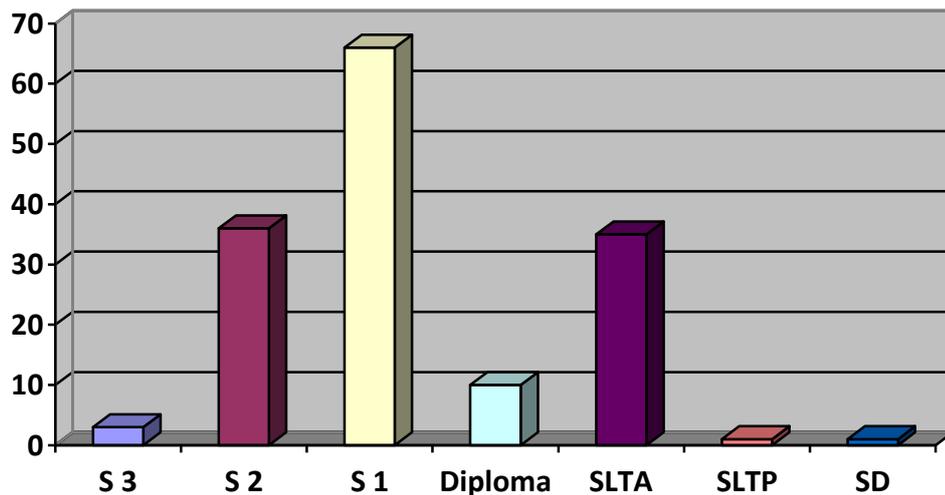


Tabel 2.3
Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Sarjana Strata III (S.3)	3	1,97
2.	Sarjana Strata II (S.2)	36	23,68
3.	Sarjana Strata I (S.1)	66	44,08
5.	Diploma	10	6,58
6.	SLTA Sederajat	35	23,68
7.	SLTP	1	
8.	SD	1	
JUMLAH		152	100,00

Sumber: Sekretariat Bappeda Prov. Riau Tahun 2013

Secara umum tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau cukup baik, dimana dari 152 orang Pegawai Negeri Sipil terdapat 96 orang atau 63,31 % yang berpendidikan Sarjana Strata I, Sarjana Strata II dan Sarjana Strata III. Secara sederhana dapat lihat gambar berikut ini.



Gambar 2.3. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Bappeda Provinsi Riau Tahun 2013



d. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Penjurangan.

Data pada Tabel 2.4. menggambarkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan penjurangan berjumlah 50 orang atau 73,53% dari total pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan penjurangan.

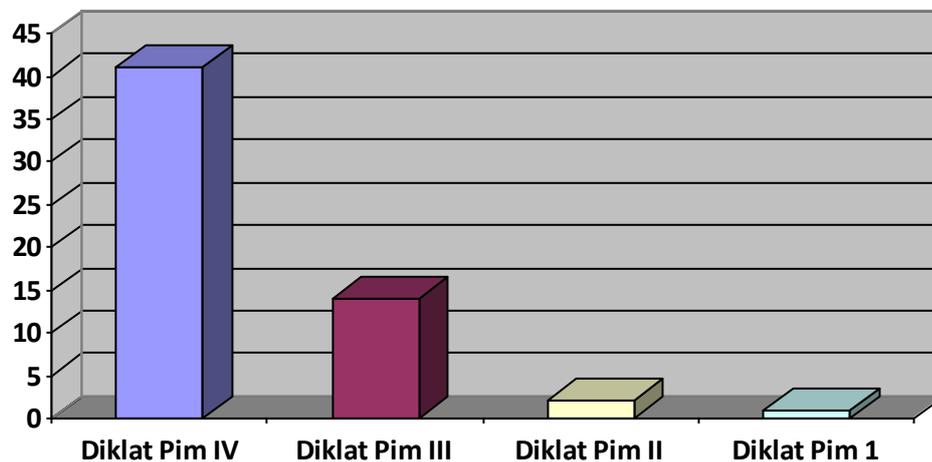
Tabel 2.4.

**Keadaan Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Provinsi Riau
Menurut Pendidikan Penjurangan Tahun 2013**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Diklatpim IV	41	73,53
2.	Diklatpim III	14	22,06
3.	Diklatpim II	2	2,94
4.	Diklatpim I	1	1,47
JUMLAH		53	100,00

Sumber : Sekretariat Bappeda Prov. Riau Tahun 2013

Secara sederhana gambaran pegawai negeri sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau yang telah mengikuti pendidikan penjurangan dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 2.4. Tingkat Pendidikan Penjurangan Pegawai Negeri Sipil Bappeda Provinsi Riau Tahun 2013



2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, memiliki 1 (satu) gedung yang terdiri dari 3 (tiga) lantai dan 1 (satu) *basement*. Setiap lantai dan ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan *Air Condition* (AC). Di setiap ruangan juga dilengkapi prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, mesin photo copy, scanner serta jaringan WiFi, untuk mendukung penggunaan teknologi informasi, sumber data dan literatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau operasional.

Tabel 2.5
Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) Bappeda Provinsi Riau Tahun 2013

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	
		(DALAM BIDANG/UNIT/BUAH)	
1	Tanah	n/a	Ha
2	Gedung	1	Unit
3	Ruang Rapat	5	Ruangan
4	Kendaraan Roda 4	20	Unit
5	Kendaraan Roda 2	1	Unit
6	Meja Biro	8	Unit
7	Meja ½ Biro	15	Buah
8	Lemari Arsip	23	Buah
9	Rak Buku	19	Buah
10	Kursi Rapat	891	Buah
11	Kursi Roda/tangan	81	Buah
12	Kursi Sofa	15	Set
13	Fil Cabinet	67	Set



14	PABX	2	Buah
15	Ploter	3	Buah
16	Kulkas	2	Buah
17	AC	75	Buah
18	Komputer	85	Buah
19	Dispenser	6	Buah
20	Laptop	69	Buah
21	Infocus	23	Buah
22	Mesin Tik	2	Buah
23	Kain Gording	3	Paket
24	Jam Dinding	4	Buah
25	B. Foto	8	Buah
26	Foto Dokumen	3	Buah
27	LCD-TV	15	Buah
28	Pot Bunga/kembang	11	Buah
29	T. Sampah besar	1	Buah
30	Brankas	8	Buah
31	Faximile	2	Buah
32	Peranti Lunak Pengelolaan dan Pengolahan Foto Satelit dan Foto Udara	Er Mapper PCI Geomatica	1 unit 1 unit
33	Peranti Lunak Pengelolaan dan Pengolahan data Spasial (keruangan)	Src View 3.1 ArcGIS 9.1 ArcGIS 10.0	1 unit 1 unit

Sumber : Sekretariat Bappeda Provinsi Riau Tahun 2013



2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Riau

2.3.1. Evaluasi Kinerja Bappeda Provinsi Riau

Dalam kurun waktu 2009-2013 BAPPEDA Provinsi Riau telah menyelenggarakan pelayanan dibidang Perencanaan secara umum sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur perencana untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna.

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, dan belum sepenuhnya menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan pedoman yang ada, dimana hasil evaluasi kinerja SKPD Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Prov. Riau

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung																	
- Belanja pegawai	13.198.757.375	14.049.173.557	18.724.116.907	21.546.021.983	23.353.266.700	9.131.270.875	9.981.543.566	16.905.403.807	18.809.582.102	20.869.848.808	69.18	71.05	90.29	87.30	89.37		
- Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Belanja hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Belanja bantuan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Belanja tidak terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai	2.566.725.000	3.510.350.000	5.147.611.000	5.604.487.000	7.115.077.000	1.944.395.000	3.044.635.000	4.843.541.500	3.717.947.000	5.765.687.000	75.75	86.73	94.09	66.34	81.03		
- Belanja barang dan jasa	15.133.793.860	19.220.889.150	29.023.384.775	44.171.242.470	56.915.096.950	11.326.297.737	16.996.904.977	25.713.577.567	31.987.825.960	46.773.657.159	74.84	88.43	88.60	72.42	82.18		
- Belanja modal	1.594.965.560	3.189.197.850	3.335.450.500	4.049.117.750	8.223.898.150	1.305.390.448	1.889.144.800	2.922.508.647	3.742.687.000	7.236.142.600	81.84	59.24	87.62	92.43	87.99		
Total	32.494.241.795	39.969.610.557	56.230.563.182	75.370.869.203	95.607.338.800	23.707.354.060	31.912.228.343	50.385.031.521	58.258.042.062	80.645.335.567	72.96	79.84	89.60	77.30	84.35		

Sumber : Sekeratriat Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014



2.3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Rincian evaluasi kinerja kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian akuntabilitas kinerja BAPPEDA Riau Tahun 2009-2013 dapat dikatakan baik karena rasio setiap tahunnya meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Bappeda Riau adalah prosedur/mekanisme yang semakin baik dan lancar serta progres pelaksanaan program yang terarah dengan percepatan dan pengendalian kegiatan APBD sebagai mana terlihat pada table Review Ketercapaian Program Bappeda 2009-2013 berikut.



Tabel 2.7
Review Ketercapaian Program Bappeda 2009-2013

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan										Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan									
			2009		2010		2011		2012		2013		2009		2010		2011		2012		2013	
			indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.778.869.960		4.715.487		6.221.465,025		7.601.209,925		9.700.197,900		3.685.567,752		4.524.900,236		5.726.713,487		6.929.076.669,00		8.690.425.894,00
	Penyediaan jasa surat menyurat		100	29.996,5	100	30	100	30	100	30	100	52.125	44,1	13.621	29,50	8.848,5	78,79	23.637	76,18	22.852'5	88,32	46.037,5
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100	697.8	100	450.000.	100	650.000.	100	679.980.	100	679.980.	79,84	557.972,692	93,70	421.657,961	66,87	434.682,256	63,84	434.114,345	76,40	519.496,538
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		100	64.524	100	112.900.	100	144.900.	100	160.800.	100	379	88,53	57.124	99,98	112.880.	83,79	121.411,356,	96,39	154.992.	67,77	265.846.
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan erizinan kendaraan dinas/operasional		100	140.900.	100	152.107,5	100	199.999.	100	240.250.	100	370.000.	43,21	60.880.	98,48	149.801,4	99,35	198.699.	88,34	212.240,45	81,61	301.955,935,
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		100	72.000.	100	97.778.	100	79.800.	100	79.800.	100	100.000.	83,85	60.374,595	88,31	86.343,7	100	79.799,4	100	79.800.	99,85	99.852.
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		100	233.030.	100	338.103,5	100	454.244,2	100	711.427,75	100	1.087.928.	96,96	225.952,2	95,72	323.626.	84,73	384.869,4	84,82	603.407,125	77	837.677,633
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		100	112.791,6	100	133.600.	100	149.960.	100	259.920,8	100	250.070.	36,07	40.685.	97,59	130.377.	53,81	80.695.	94,19	244.815.	97,09	242.798.
	Penyediaan alat tulis kantor		100	287.750,32	100	400.000.	100	399.992,5	100	399.991,8	100	550.173,8	99,38	285.966,94	99,42	397.673,75	99,99	399.950,7	99,94	399.748,05	99,88	549.513,86
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100	296.397,94	100	364.500.	100	349.999,325	100	349.999,575	100	550.531,1	84,42	251.392,675	96,32	351.081,1	99,79	349.248,475	81,06	283.700,663	98,38	541.628,2



	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100	101.309.8	100	117.842.5	100	150	100	280.090.	100	326.000.	99,91	101.219.6	99,98	117.815.75	98,86	148.289.8	85,22	238.695.	99,84	325.475
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100	407.905	100	591.900.	100	900.000.	100	1.220.000.	100	1.090.000	83,62	341.070.55	91,86	543.729.	90,86	817.755.	89,54	1.092.350	92,81	1.011.637
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100	49.999.8	100	145	100	60.000.	100	80.496.	100	200	60,14	30.707.	97,79	141.792	83,00	49.8	97,89	78.797.5	62,12	124.249
	Penyediaan makanan dan minuman		100	245.775	100	292.055.5	100	325	100	324.994	100	414.64	95,25	234.111	85,78	250.529.375	96,76	314.467	97,33	316.313.5	76	315.135
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100	2.038.69	100	1.489.7	100	2.302.57	100	2.758.46	100	3.499.75	69,87	1.424.490.5	99,94	1.488.744.7	99,90	2.300.309.1	99,89	2.755.455.536	96,51	3.377.539.128
	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian					100	25	100	25	100	150					92,40	23.1	47,18	11.795	87,72	131.585.1	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			939.812.56		1.072.245				4.558.172.75					705.340.943						3.113.686.58	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100	65.9	100	75	100	580.65	100	670.65	100	719.53	25,49	16.8	83,46	62.595	76,53	444.391	91,82	615.798	56,96	409.815.6
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		100	204.55	100		100	830.4	100	718.4	100	1.609.230	77,99	159.531.338			88,59	735.682	95,49	685.971	97,39	1.567.165.5
	Pengadaan Mebeleur		100	73.610.56	100		100	74.980.5	100	204	100	627.8	46,95	34.560.560			95,82	71.85	96,79	197.45	99,25	623.063
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				100	400	100	570	100	200					95,53	382.114	81,85	466.534	62,19	124.375		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100	150	100	190	100	500	100	1.926.600	100	1.562.000	86,59	129.882	93,74	178.1	87,90	439.514	35,76	688.924.98	96,75	1.511.206
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		100	73.552	100	79.395	100	69.75	100	69.4	100	150	95,92	70.55	99,33	78.866.5	67390	67.39	92,79	64.395.35	69,51	149.026.016
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100	100	100	151.5	100	175	100	174.2	100	214.4	96,33	96.33	97,34	147.463	100	142.056.5	97,89	170.527.85.	98,60	211.397.451



	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		100	100	100	64.000.	100	100	100	100	100	155	54,23	54.225	98,20	62.85	37,11	37.105	80,18	80.175	99,98	154.974
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100	100	100	74.1	100	75	100	75	100	155	77,56	77.560,045	99,81	73.957	93,88	70.41	99,98	74.983	82,11	127.272.5
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		100	72.200.000	100	38.250.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	75.000.000,00	91,28	65.902.000	99,33	37.995.000,00	99,63	19.925.000,00	100	20.000.000,00	98,93	74.200.000,00
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional										100	425									94,50	401.621.5
	DED Rehab Gedung Kantor								100	199.999.125									97,51	195.017.9		
	DED Prasarana Ibadah Kantor Bappeda Provinsi Riau dan Komplek Gubernur								100	199.923.625									98,07	196.068.5		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			189.9		151.5		92.75				182.5		177.903.825		144.655.5		62.6				146.854.15
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		100	67.35	100	75.75					100	91.25	96,33	64.877.175	95,84	72.6					89,36	81.54
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		100	72.9	100	75.75							89,41	65.176.65	95,12	72.055.5						
	Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya						100	92.75									67,49	62.6				
	Pengadaan Pakaian Korpri		100	49.65							100	91.25	96,37	47.85							71,58	65.314.15
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			313.9		474.72		224.9		1.255.720		991.7		80.527		441.747.35		184.786		784.115.6		917.648.9
	Pendidikan dan pelatihan formal		100	237.94	100	225	100	174.9	100	424.92	100	537.500.	8,44	19.677	95,82	215.6	77,53	135.602	89,78	381.495	92,06	494.8
	Pembinaan Mental/Rohani/Jasmani				100	49.72	100	50	100	80.8	100	97.2			99,88	49.661.6	98,37	49.184	93,87	75.85	88,89	86.4
	Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Aparatur Perencana				100	200					100	200			88,24	176.485.75					94,98	189.95



Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja bagi Aparatur Eselon II dan III Pemerintah Provinsi Riau									100	600								30,42	182.492,6			
Penyusunan Beban Kerja, Peta Jabatan dan Analisis Jabatan Bappeda Provinsi Riau									100	150								96,19	144.278			
Sosialisasi Permendagri NO. 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Bappeda Provinsi Riau											100	157								93,31	146.498,9	
Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan			100	75,96									38,76	60,85								
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan				56.000.						50		450		15.851						23.000.	394.642,95	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			100	40	100	50								-	86,20	43,1						
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			100	16	100	50			100	50.000.	100	50.000.	99,07	15.851	93,87	46.933,8			46,00	23	87,35	43.675
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD											100	250									88,57	221.412,5



	Rapat Teknis Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau										150.000.										129.555.45	
	Program Pengembangan Data/Informasi		814.447.7		2.643.475		5.363.396.35		4.684.449.75		4.693.920		786.252.275		2.121.926.845		4.831.209.502		3.980.515.811		3.781.632.8	
	Peningkatan Jaringan Intranet di Bappeda Provinsi							100	925.000.		100	950					95,85		886.630.75		59,43	564.541.9
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan		100	500	100	665	100	650	100	860			98,32	491.579.875	63,73	423.781.85	97,29	632.361.55	82,20	706.925		
	Penyusunan Dokumen Analisis Statistik Perencanaan						100	158									91,30	144.258.6				
	Pengelolaan Data Berbasis Sistem Informasi						100	150									96,17	131.45				
	Penyusunan Dokumen Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Provinsi Riau								100	200								96,83	193.668.761			
	Pengembangan Sistem Informasi Data Pembangunan								100	349.75								93,63	327.467.2			
	Penyusunan Profil Daerah				100	249.95									93,62	234						
	Pencetakan Buku Hasil-hasil Penelitian				100	200									82,76	165.522.5						



	Peningkatan Pemerataan Jaringan LAN di Bappeda Provinsi Riau				100	158.525	100	350.000.							88,43	140.186.995	92,49	323.697.927				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi				100	200	100	299.1	100	300	100	473.92			61,92	123.83	97,09	290.408.9	91,08	273.252.5	76,45	362.293.8
	Partisipasi dan Pelaksanaan Pameran Tahunan Provinsi Riau		100	100	100	75	100	175	100	200	100	275	82,99	82.986.7			84,28	147.489.525	93,65	187.299.2	94,84	260.797.8
	Pengadaan Perangkat GIS				100	800									92,91	743.243.9						
	Studio Infrastruktur dan Lingkungan Hidup				100	95									97,82	92.932.9						
	Presentasi Gubernur Riau di Bidang Perencanaan				100	200									99,21	198.428.7						
	Kajian Pengembangan Agrobisnis Kelapa Terpadu dalam rangka Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa di Indragiri Hilir								100	550									97,98	538.910.5		
	Konsolidasi Pengukuran Ketahanan Nasional Wilayah di Daerah								100	249.699.75	100	300							89,93	224.584.5	79,73	239.181.8
	Penerbitan Majalah Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau								100	300	100	450							90,99	272.978.8	93,60	421.189



	Perhitungan Karbon Sink Cagar Biosfer Giam Siak Kecil / Bukit Batu							100	750								49,17	368.798.95		
	Survey Besaran Pengeluaran Sektor Publik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Prov. Riau					100	700										98,61	690.249.5		
	Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Transaksi Ekonomi di Prov. Riau					100	800										98	783.975		
	Penyusunan Input-Output Ekonomi Regional Prov. Riau					100	1.500.000										78,90	1.171.290		
	Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010					100	481.296.35										87,42	420.746.5		
	Pembuatan Visualisasi Profil Bappeda Provinsi Riau					100	100										95,28	95.282		
	Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Daerah Provinsi Riau									100	400								77,01	308.044.5
	Pembangunan Sistem Aplikasi Tata Naskah Dinas									100	500								85,94	429.694.85



	Penyediaan Buku Agenda Bappeda Prov. Riau									100	495									88,47	437.903	
	Penyusunan Data Statistik Provinsi Riau									100	850										89,17	757.986.15
	Pembangunan Jaringan Hotspot di Bappeda Provinsi Riau		100	214.447.7									98,71	211.685.7								
	Program Kerjasama Pembangunan			1.02		1.133.380		3.184.294.5		3.054.663.5		2.387.320.5		899.83		961.241		2.820.537		2.230.306.912		1.631.193.474
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah & Konsultasi Regional OP Pengairan Wilayah I		100	50	100	50	100	100	100	300	100	275	98,05	41.891	85,45	42.725	96,59	96.588.5	92,14	276.433.5	77,93	214.294.7
	Kerjasama Ekonomi Sub Regional, Antar Daerah & Antar Negara						100	500									69,12	345.602.1				
	Operasional Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Prov. Riau						100	534.31									84,60	452.046.6				
	Operasional Pelaksanaan Tim Percepatan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit dan Kawasan Ekonomi Khusus						100	199.984.5									95,15	190.276.5				
	Pengendalian dan Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Bidang Perumahan Rakyat							100	350										78,65	275.267.3		



	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah dan Antar Negara		100	400	100	550			100	728.733	100	1.280.320.5	80,72	322.898	75,37	414.516		67,38	491.001.4	56,49	723.200.774
	Evaluasi Efektifitas Sharing Program Antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Prov. Riau Tahun 2011 dan Strategi Perencanaan Sharing Program Tahun 2013							100	215.607.97									95,98	205.117.9		
	Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Riau Tahun 2012							100	550									98,97	544.345.6		
	Perencanaan Pengembangan Sektor Unggulan dalam rangka Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Provinsi Riau dengan Pendekatan Input-Output Multiregional							100	28.451.05									100	28.451.05		
	Koordinasi Implementasi Program Corporate Social Responsibility Dunia Usaha Provinsi Riau							100	250	100								90,68	226.693.3		



Tindak Lanjut Pertemuan Gubernur Se- Wilayah Sumatera Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jalan Tol I Sumatra Tahun 2012								100	450	100	450							5,58	25.132.4	82,07	369.314.3
Bimbingan Teknis Hubungan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Luar Negeri								100	181.871.5									86,80	157.864.462		
Tindaklanjuti dan Persiapan Forum Gubernur Se Wilayah Sumatera				100	533.38	100	150						94,49	504	93,99	140.979.3					
Kerjasama Pembangunan Antar Negara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup						100	1.700.000								93,83	1.595.044.					
Evaluasi Efektifitas Sharing Program Antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau										100	232									84,61	196.283.7
Rapat koordinasi Persiapan CMGF dan SOM-MM											150									85,40	128.1
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera		100	570										93,87	535.041							
Program Pengembangan Perbatasan Wilayah																					
Sosialisasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan		100	221										79,28	175.205							



	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar					1.450.000		475			1.000.000		650			226.093		422.882		815.131.725		337.657.75	
	Koordinasi Pelaksanaan Program PZKP		100	86.35	100	100							90,33	85.45	84,40	84.4							
	Koordinasi Pelaksanaan Program PAMSIMAS		100	94.6	100	150	100	275	100	350	100	325	76,28	72.165.5	94,46	141.693	90,09	247.759.8	95,16	333.063.825	56,03	182.091.45	
	Penyusunan Program Skala Prioritas Pembiayaan Penanganan Jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau				100	1.200.000									0	-							
	Koordinasi Pelaksanaan Program PNPMP mandiri Perkotaan						100	200	100	350	100	325					87,56	175.122.2	65,32	228.629.8	47,87	155.566.3	
	Analisis Kapasitas Drainase dan Jalan Raya di Pekanbaru dengan Menggunakan Maksimum Flow Technique (Studi Kasus Dalam Perencanaan Strategis Manajemen Infrastruktur Pemerintah)								100	300								84,48	253.438.1				
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah			4.525.549.95		2.101.631.9		2.425.000		5.423.530.308		4.759.600		2.825.603.22		1.867.461.8		2.281.318.573		3.267.833.812		4.135.325.001	
	Grand Desain Aplikasi Naskah Dinas						100	150									78,14	117.204.5					
	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana		100	657.95	100	808.803.2	100	880	100	950	100	1.000.000	97,74	643.1	98,77	798.853.2	97,88	861.370.9	90,67	925.749	88,93	889.290.4	
	Workshop Penyusunan Renstra SKPD Prov. Riau						100	200									97,62	195.230.8					



Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Bappeda	100	888.124.95									72,70	645.648.7							
Penyempurnaan RTRW Provinsi Riau 2007-2026 sebagai Implikasi terbitnya UU No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang	100	2.789.775									48,77	1.360.436.52							
Bimtek dan Seleksi Tenaga Lelang		97,55									87,15	85.018							
Barang dan Jasa Bappeda Provinsi Riau																			
Penyusunan dan Sosialisasi SOP dan SPP Penyusunan RENJA, RKPD dan PPAS SKPD Pemerintah Prov. Riau					100	300								97	291.03				
Bimtek dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Kinerja (Penja, RKT dan IKU)					100	195	100	200						97,4	189.975.4	75,9	151.779.100,00		
Peningkatan Kemampuan Analisa Statistik dan Pendataan Bagi Aparatur					100	200								92,2	184.422.5				
Pelatihan Penyusunan Input-Output Ekonomi Regional							100	200								96,8	193.688.761		
Peningkatan Kerjasama Fasilitas dan Fungsi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu							100	1.100.000								33,5	368.798.95		
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Perencanaan di Provinsi Riau							100	65								83,8	54.532.63		
Pelaksanaan Kegiatan Achievement Motivation Training					100	250	100	350						96,6	241.580.4	94,7	331.439.9		
Kajian Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi di Provinsi Riau Program MP3EI							100	973.530.308								77,71	756.496.3		
Sosialisasi Pemahaman tentang Cluster Industri Hilir Kelapa Sawit untuk Mendukung Program MP3EI							100	750								56,68	425.116.276		



Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah				100	390.428.7									65,14	254.205.7						
Updating Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Bappeda				100	250									91,94	229.844.9						
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan di Provinsi Riau					100									88,35	88.35						
Penerapan, Evaluasi dan Audit ISO9001:2000 Bappeda Provinsi Riau	100	92.15	100	216.05	100	250	100	250	100	270	99,19	91.4	86,60	187.11	80,20	200.504.073	24,09	60.232.7	76,06	205.364.6	
Peningkatan Kemampuan Analisa Statistik dan Pendataan bagi Aparatur				100	136.35									86,36	117.75						
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Motivasi Aparatur Perencana				100	200					100	289.6			95,67	191.348					95,82	277.503
Workshop Penyusunan Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD Provinsi Riau										100	650									80,36	522.331.3
Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencanaan Aparatur										100	1.250.000									91,20	1.139.947.601
Bimbingan Kemampuan Tim Building Aparatur Perencanaan Provinsi Riau										100	700									89,61	627.263.8
Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Bagi Aparatur										100	600									78,94	473.624.3



Program Perencanaan Pembangunan Daerah			3.845.217.1		4.095.291.1		13.598.859.9		19.785.616.767		30.674.733.7		3.424.264.37		3.461.131.995		12.516.389.454		11.465.948.035		23.882.840.181	
Penyusunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009-2013		100	938.6									97,03	910.720.4									
Penyusunan rancangan RKPD		100	346.45	100	400	100	415	100	650	100	700	78,37	271.513.9	84,70	338.795.5	97,15	404.762.04	89,84	583.944.09	89,57	626.978.718	
Penyelenggaraan musrenbang RKPD		100	662.184.7	100	700	100	850	100	895	100	925	92,59	613.119.285	93,84	653.372.72	93,68	796.240.222	91,35	817.600.1	92,25	853.310.3	
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)		100	531.949.7	100	640.291.1	100	765	100	790	100	850	90,25	480.068.385	93,97	601.670.35	94,46	722.643.808	90,27	713.097.873	82,16	698.350.8	
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			539.349.25		650		868.86		943.86		950		444.656.5		592.069.425		699.604.824		733.612.78		773.586.95	
Penyediaan Buku Agenda Bappeda		100	149.983.45			100	175	100	250			97,70	146.532.2			86,64	151.627.5	88,02	220.047.2			
Evaluasi Program Sharing Budget Tahun 2008-2009 dan Koordinasi Perencanaan Program Sharing Budget Tahun 2011				100	350									85,56	299.45							
Koordinasi Sinkronisasi dan Konsultasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan				100	200			100	180.88	100	640						89,69	162.228.2	91,31	584.369.9		
Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Aparatur				100	300	100	425	100	450	100	750			90,22	270.65	95,65	406.507.9	72,61	326.725.	77,04	577.775.978	



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja & Penja (Penetapan Kinerja)	100	85.3	100	100	100	100					99,15	84.575	82,38	82.375	99,35	99.35				
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	100	500									78,95	394.728.7								
Koordinasi & Penyusunan Laporan Kinerja, Penja (Penetapan Kinerja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)							100	160	100	175							95,16	152.252.2	93,15	163.007
Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Riau Tahun 2009-2013			100	80									86,72	69.375						
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah			100	675	100	550	100	540					81,98	553.374	92,52	508.870.4	89,65	484.127.9		
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan					100	300	100	325	100	750					97,88	293.63	63,47	206.278.1	75,98	569.867.66
Penyusunan Kebijakan Penataan Asset Milik Pemerintah dalam rangka Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Asset Milik Pemerintah Provinsi Riau								100	440.382.167								45,97	202.430.367		
Koordinasi Penataan Pembangunan Pedesaan Wilayah Provinsi Riau							100	450	100	500							32,97	148.349.1	98,74	444.339.7
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup					100	600	100	550	100	1.100.000					97,96	587.773.4	89,01	489.529.325	88,51	973.632.3
Penyelesaian RTRW Provinsi Riau							100	2.700.000									48,50	1.309.463.4		
Penyusunan Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Provinsi Riau							100	400	100	2.000.000							6,43	25.7	82,57	1.649.920.05



Penyiapan Materi/Paparan/Makalah Pimpinan Terkait Perencanaan Pembangunan di Prov. Riau						100	350	100	250	100	250					99,49	348.210,7	92,86	232.159.325	99,51	248.770,74
Analisa Perilaku Ekonomi Provinsi Riau								100	34.084,6									98,94	33.721,6		
Sinkronisasi RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten/Kota								100	400	100	581,39							21,10	84.418.575	90,07	523.633,8
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD								100	250									90,86	227.117,85		
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah di Provinsi Riau								100	550,25	100	500							95,88	527.567,4	89,77	448.873,4
Penyusunan Master Plan Air Minum Regional Inhil, Inhu dan Kuansing								100	2.500.000									95,21	2.380.260,6		
Revisi Renstra Bappeda Provinsi Riau 2009-2013								100	150									91,92	137,879		
Masterplan Air Minum Regional Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu dan Kota Dumai								100	2.000.000	100	2.500.000								-	68,72	1.718.117,45
Penyusunan Master plan Drainase Kota Pekanbaru								100	2.000.000										-		
Koordinasi Implementasi Revisi RPJMD Provinsi Riau								100	426,16									98,40	419.322,8		
Rapat Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (RAKER BKPRD)								100	500									33,16	165.783,45		
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca								100	1.000.000									68,23	682.331,1		
Evaluasi Capaian Sasaran dan Target RPJMD Prov. Riau 2009 - 2013						100	650									84,11	546.698,065				
Koordinasi, Sinkronisasi Program Penelitian Prioritas Prov. Riau						100	200									93,57	187.132,2				
Penyusunan Indikator Penetapan Pagu Prioritas Pembangunan Prov. Riau						100	100									99,65	99,652				



Evaluasi Efektifitas Sharing Program Antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota Se-Prov. Riau Tahun 2010 dan Strategi Perencanaan Sharing Program Tahun 2012					100	275								87,12	239.575,5				
Evaluasi/Monitoring Penetapan Kinerja(Penja) SKPD Prov. Riau		100	91,4		100	200				85,72	78,35			90,40	180.798.945				
Penetapan Nilai SPM (Standar Pelayanan Minimum) Jalan Prov. Riau					100	750								93,45	700.893				
Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan					100	1.000.000								94,55	945.549,2				
Penetapan Urutan Daerah Dalam Pembiayaan Penanganan Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Prov. Riau					100	1.200.000								97,00	1.164.015				
Kajian Dampak Daerah Pemekaran Dalam Kaitannya dengan Kebijakan Pembangunan di Prov. Riau					100	1.000.000								96,92	969.247,6				
Penyelesaian Pembahasan dan Pengesahan Ranperda RTRW Prov. Riau					100	2.750.000								86,86	2.388.757,25				
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Musrenbang					100	74.999,9								99,90	74.849,9				
Penyusunan Rancangan RPJMD								100	650									98,61	640.966,2
Penyusunan Prioritas dan Pagu Anggaran 2014								100	150									92,74	139.106,55
Peningkatan Kerjasama Fasilitasi dan Fungsi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu								100	1.100.000									50,72	557.882,2
Sosialisasi RTRW Provinsi Riau 2010 -2030								100	1.450.000									51,80	751.048,3



Penyusunan Master Plan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kota Pekanbaru, Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, Kab. Siak										100	2.500.000									85,60	2.140.054,9	
Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah										100	1.150.170										89,65	1.031.154.395
Perencanaan Strategis Teknologi Informasi Bappeda Provinsi Riau										100	350										51,48	181.444
Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah(EKPD) Provinsi Riau										100	500										93,64	468.186,5
Pengendalian dan Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Perumahan dan Pemukiman										100	300										72,70	218.111,9
Studi Kelayakan Pembangunan Jembatan Bangsal Aceh (Kota Dumai) Darul Aman(Kab. Bengkalis)										100	500										96,15	480.746,6
Koordinasi Implementasi Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dunia Usaha Provinsi Riau										100	434										61,73	267.924,15
Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010										100	500										69,35	346.598,6
Studi Kelayakan Pembangunan Jembatan Buton (Kab. Siak)- Lukit (Kab. Kep. Meranti)										100	500										87,55	437.764,9
Study Kelayakan Jalan Bebas Hambatan / Jalan Tol Rengat - Tembilahan - Kuala Enok										100	1.200.000										92,06	1.104.764,3



Study Kelayakan Jaringan Transportasi Kereta Api Provinsi Riau											100	2.000.000									64,89	1.297.811.65
Study dan Seminar Pengembangan Sumber Pembiayaan Pembangunan Alternatif Melalui Publik Private Partnership											100	80.313.7									100	80.313.7
Optimalisasi Peran Pelayanan Terpadu dalam Menunjang Birokrasi Daerah di kabupaten / Kota Provinsi Riau											100	550									94,90	521.973.
Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Kab / Kota se Provinsi Riau											100	500									60,18	300.895.2
Pengendalian Pelaporan Inpres No. 3 Tahun 2010 di Provinsi Riau											100	283.86										267.908.7
Seminar Pengembangan Sumber Pembiayaan Pembangunan Alternatif melalui Public Private Partnership											100	485									55,24	323.333.44
Study Pendahuluan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau											100	570									95,42	543.867.5
Survey Pembiayaan Kegiatan Sektor Pendidikan dalam Percepatan Peningkatan Mutu, Pemerataan dan Peningkatan Kinerja Ekonomi Masyarakat di 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau											100	650									97,16	631.542
Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda Provinsi Riau											100	50									91,92	45.961.8
Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Asset Milik Pemerintah Provinsi Riau											100	450									55,32	248.944.15
Masterplan Persampahan Kota Pekanbaru (Swakelola)											100	600										-



Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			572.887.15		2.550.000		1.075.000		3.236.504.2		6.875.000		209.980.95		2.085.915.664		929.176.5		2.529.346.9		5.372.950.15	
Penyusunan RAD PPDT Provinsi Riau		100	572.887.15										36,65	209.980.95								
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA				100	300	100	400	100	550	100	800			99,15	297.464	81,05	324.209.6	86,07	473.373.7	69,94	559.534.9	
Peningkatan Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Prov. Riau										100	400									69,95	279.780.8	
Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau								100	350									58,22	203.764.725			
Kajian Strategi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau								100	275									85,44	234.953.7			
Percepatan Pembangunan Klaster Industri Berbasis Pertanian dan Oleokimia IHKS di Provinsi Riau								100	250	100	300							73,20	183.011.575	50,47	152.227	
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Koridor Ekonomi Provinsi Riau								100	400									72,79	291.177.775			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Riau								100	486.504.2	100	300							79,32	385.908.125	57,60	172.786.275	
Masterplan Gerakan Riau Menanam Buah								100	625									74,04	462.720.425			
Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Bengkalis dan Kab. Indragiri Hilir								100	300									98,15	294.436.875			
Penyusunan RAD dan STRADA PDT Provinsi Riau				100	250									93,00	232.500.264							
Konsultasi Manajemen OPRM				100	1.000.000									68,47	684.726							
Penyusunan Model Pembangunan Pertanian Terpadu				100	300									67,08	201.225.4							



	FS Klaster Industri Hilir Dumai				100	350								95,71	335						
	FS Klaster Industri Hilir Kuala Enok				100	350								95,71	335						
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan Non Formal di Provinsi Riau						100	675									604.966,9				
	Analisis Kontribusi Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian di Provinsi Riau									100	400									90,45	361.791,85
	Masterplan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan									100	500									83,27	416.345,7
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Riau									100	400									74,61	298.449,8
	Studi Kelayakan Pengelolaan Jalan Transportasi ke kawasan IHKS Kuala Enok dari Aspek Keuangan									100	250									74,38	185.956,65
	Perencanaan Pengembangan Ekonomi Sektor Pertanian melalui Peningkatan Peran Tata Niaga Komoditas Beras Kab / Kota									100	950									82,18	780.709,9
	Studi Analisis Perencanaan dan Tata Kelola Pembiayaan Pembangunan dalam Percepatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Provinsi Riau									100	875									85,46	747.764,4
	Masterplan Pembangunan Ekonomi Prov. Riau									100	900									77,70	795.974,875
	Studi Evaluasi Program Strategis di Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA									100	800									77,70	621,628



	Program Perencanaan Sosial Budaya		991.6		4.784.432.		1.325.000		2.645.000		3.439.170		863.520.75		4.064.376.94		1.099.934.05		1.579.965.375		2.740.787.192
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	100	193	100	300	100	475	100	450	100	592.5	89,02	171.815.5	72,74	218.227.4	86,97	413.111.15	79,76	358.903.6	69,12	409.551.600,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	100	205									82,36	168.840.2								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	100	128.15									79,34	101.669.2								
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Riau	100	150									87,82	131.725								
	Pengendalian Pelaksanaan Pengembangan Jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau							100	250									91,82	229.584.1		
	Sosialisasi Tujuan dan Target Program MDG's							100	350									91,95	321.826.4		
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RANDA) Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Riau							100	225									87,47	196.799.9		
	Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)							100	380										365.078.3		
	Studi Kelayakan Pembuatan TV Komunitas dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau							100	750												-
	Penyempurnaan RTRW Provinsi Riau Tahun 2007-2026 Implikasi Terbitnya UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang			100	3.234.432								84,38	2.729.206							



	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup				100	500							96,91	484.571							
	Pengendalian Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Riau				100	150	100	200			100	300		91,27	136.9	77,66	155.325.5			80,40	241.189.62
	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Unggulan Pariwisata di Provinsi Riau				100	150								73,63	110.443.29						
	Rencana Tindak Lanjut Rencana		100	315.45			100	150	100	240			91,76	289.470.85		93,30	139.95	44,91	107.773.075		
	Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi(RAD-PK) Provinsi Riau				100	250								91,60	229						
	Studi Evaluasi Pelaksanaan Guru Bantu se-Propinsi Riau				100	200								78,01	156.029.25						
	Sosialisasi Rencana Aksi Nasional(RAN) Kepemudaan						100	150								98,02	144.036.2				
	Penyusunan RAD MDG's Provinsi Riau						100	350								70,72	247.511.2				
	Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan dan Target Program MDGs									100	650									75,09	488.098.65
	Koordinasi Percepatan Program Keluarga Harapan (PKH)									100	400									61,08	244.335.9
	Penyusunan, Fasilitasi, Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPK) Provinsi Riau dan Kab / Kota									100	446.92									80,75	360.899.822
	Penyusunan Indek Pemberdayaan Gender Provinsi Riau									100	400									92,05	368.216.6
	Kick Off Meeting Program Keluarga Berencana dalam mendukung Pencapaian Tujuan dan Target MDGs 2015 di Provinsi Riau										336									97,39	327.245
	Sosialisasi Strategi Nasional Pengarustamaan Gender (PUG) di Provinsi Riau									100	313.75									96,02	301.25



	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		845.35	648.275	425	530					568.770.6	625.147	378.260.75	497.032.9				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir dan Kelautan (MCRMP) Riau (LOAN ADB SF-1170) Pendamping dan Penunjang Koordinasi Pengelolaan SDA	100	402.1								54,05	217.324						
	Penguatan Pusat Data Spasial Provinsi Riau Penunjang Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut						100	180	100	200			235.147		94,31	169.754.9	81,76	163.511.9
	Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam	100	443.25				100	350	100	750	79,29	351.446.6		390	93,51	327.278	86,50	684.730.4
	Operasional Pusat Data Spasial Provinsi Riau Penunjang Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut			100	248.275	100	175						80,98	141.720.9				
	Identifikasi Potensi Kawasan Mangrove dan Analisis Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif dan Nipah			100	400													
	Penyusunan Neraca Kelautan dan Sumber Daya Pesisir Prov. Riau					100	250						94,62	236.539.85				
	Strategi Pengembangan Perkebunan Rakyat di Provinsi Riau								100	400							91,04	364.146.05
	Penyusunan Kemampuan daya Dukung Lahan Terhadap Perkebunan Kelapa Sawit di Prov. Riau								100	300							94,35	283.053

Sumber : Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Riau Tahun 2013



2.3.3 Kinerja Pelayanan Bappeda periode 2014-2019

Dalam pelaksanaan kinerja dan pelayanan Bappeda Provinsi Riau, maka perlu dilihat dari indikator yang terukur. Indikator tersebut harus dapat menjadi indikator utama dalam pengukuran suatu organisasi dalam hal ini Bappeda Provinsi Riau. Dilihat dari kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Riau, maka dapat disimpulkan indikator utama Bappeda Provinsi Riau adalah persentase dokumen perencanaan berkualitas dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan, Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi, Jumlah kebijakan/rekomendasi kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan serta jumlah data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line/elektronik.

a. Persentase dokumen perencanaan berkualitas dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan

Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan. Kewenangan perencanaan dan pengendalian tersebut telah diatur didalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan pada alinea terdahulu. BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang harus dilaksanakan, yaitu urusan kordinasi penyelenggaraan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik.

Dalam menjalankan fungsi dan peran sebagaimana disebut diatas, tentunya produk yang dihasilkan merupakan bagaimana terwujudnya rencana pembangunan daerah yang berkualitas, yang dapat mencapai visi dan misi daerah baik di dalam RPJPD maupun RPJMD. Banyak serta luasnya pemahaman mengenai perencanaan berkualitas menjadi kendala dalam mengukur indikator perencanaan yang berkualitas. Dalam hal pencapaian jangka menengah,



pengukuran perencanaan berkualitas dapat diukur melalui ketercapaian indikator kinerja daerah (IKD) yang tercantum di dalam RPJMD. Namun banyaknya kewenangan SKPD lainnya di dalam pencapaian IKD maka akan sulit mengukur ketercapaian dari kinerja Bappeda itu sendiri.

Sinkronisasi antar dokumen perencanaan merupakan suatu keharusan agar tercapainya tujuan dan sasaran baik didalam ketercapaian RPJMD maupun Renstra maupun program tahunan. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan merupakan tugas yang ada pada Bappeda Provinsi Riau sehingga ketercapaian visi dan misi baik pada RPJMD maupun Renstra SKPD dapat tercapai. Oleh karena itu, sinkronnya antar dokumen perencanaan dapat menjadi indikator tercapainya perencanaan yang berkualitas. Tentunya dokumen perencanaan yang dapat menjadi acuan terhadap perencanaan yang berkualitas adalah dokumen perencanaan yang saling berhubungan langsung terhadap capaian masing-masing dokumen seperti RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Mencermati keterhubungan masing-masing dokumen, maka indikator Persentase dokumen perencanaan berkualitas dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui *persentase kesesuaian PPAS dengan RKPD, Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD dan Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD.*

b. Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi

Demi mewujudkan dokumen perencanaan yang berkualitas tentunya harus didukung oleh aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang perencanaan. Pemerintah Provinsi Riau masih sedikit memiliki aparatur perencana yang memiliki kemampuan dalam bidang perencana. Tentunya kemampuan di bidang perencanaan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tentang perencanaan.

Kebutuhan akan aparatur perencana selain dibutuhkan pada Bappeda Provinsi Riau, juga dibutuhkan oleh SKPD lainnya sebagai perencanaan pada



SKPD dimaksud. Minimal untuk masing-masing SKPD pada sub bagian bina program harus memiliki 1 orang staf yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang perencanaan serta 1 orang fungsional perencana. Berikut ditampilkan jumlah kebutuhan aparatur perencana pada Pemerintah Provinsi Riau dengan menggunakan SOTK tahun 2013 :

Tabel 2.8
Jumlah Kebutuhan Aparatur Perencana
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

NO	KETERANGAN	JUMLAH			TOTAL
		PEJABAT STRUKTURAL	FUNGSIONAL PERENCANA	STAF	
1	Sekretariat Daerah : 9 Biro	9 (kasubbag TU)	9	9	18
2	Bappeda	23	12	117	152
3	SKPD Lainnya	41 (Kasubbag Bina Program)	41	41	123
TOTAL		73	57	172	293

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah aparatur perencana yang harus memiliki kompetensi di bidang perencanaan adalah berjumlah 293 orang. Kebutuhan riil yang dibutuhkan terhadap aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang perencanaan adalah berjumlah 220 orang mengingat 73 pejabat struktural karena jabatannya dianggap sudah mampu di bidang perencanaan. Sedangkan pada Bappeda Provinsi Riau, idealnya seluruh staf yang berjumlah 117 orang harus memiliki kompetensi di bidang perencanaan. Sedangkan masing-masing bidang pada Bappeda Provinsi Riau harus memiliki setidaknya 2 orang fungsional perencana untuk mendukung kinerja Bappeda Provinsi Riau agar lebih optimal.

Bappeda Provinsi Riau selaku Pembina aparatur perencana telah melakukan beberapa kegiatan demi peningkatan kapasitas aparatur perencana dengan melakukan diklat dan bimtek di bidang perencanaan serta pengiriman aparatur untuk peningkatan pengetahuan perencana. Berikut ditampilkan



aparatur yang telah memiliki sertifikat perencana dasar maupun sertifikasi fungsional perencana.

Tabel 2.9
Jumlah Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang telah memiliki sertifikat perencanaan dasar maupun sertifikat fungsional Perencana

NO	PELAKSANAAN DIKLAT	JUMLAH	KET
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	125 orang	
2	Fungsional Perencana	20 orang	
3	Diklat Lainnya	-	
	TOTAL	145 orang	

Dapat dilihat dari diatas bahwa aparatur Pemerintah Provinsi Riau yang telah memiliki sertifikat perencanaan berjumlah 145 orang. Dari kebutuhan yang telah disebutkan diatas, tentunya aparatur Provinsi Riau masih kekurangan 75 orang aparatur perencana.

c. Jumlah kebijakan/ rekomendasi kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan

Demi terciptanya penyusunan dokumen perencanaan berkualitas dibutuhkan program dan kegiatan penunjang sebagai dasar penyusunan kegiatan-kegiatan perencanaan serta pengendalian program dan kegiatan SKPD. Pelaksanaan Program dan kegiatan penunjang diharapkan akan menciptakan suatu kebijakan serta rekomendasi kebijakan di bidang perencanaan. Tentunya indikator Jumlah kebijakan/ rekomendasi kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan dapat menjadi acuan kinerja pelayanan bappeda Provinsi Riau.

d. jumlah data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line/elektronik.

Pada indicator selanjutnya, selain rekomendasi kebijakan tentunya ketersediaan data dan informasi menjadi salah satu factor penting di dalam



penyusunan perencanaan. Ketersediaan data yang akurat akan memudahkan menghitung perencanaan yang matang terhadap apa yang diinginkan pada periode selanjutnya. Oleh karena itu jumlah data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line/elektronik dapat menjadi indikator pelaksanaan kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Riau selanjutnya.

Tabel 2.10
Ketersediaan Data Dasar pada Bappeda Provinsi Riau

NO	JENIS DATA	KETERANGAN
1	Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau	Up date Setiap Tahun
2	Data untuk penyusunan RKPD	Up date Setiap Tahun
3	Data Statistik	Up date Setiap Tahun
4	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Up date Setiap Tahun
5	Data Bidang Sosial Budaya	Tahun 2016-2018
6	Data Spasial Informasi Pembangunan Provinsi Riau	Tahun 2015-2018
7	Data Spasial Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pesisir dan Laut	Up date Setiap Tahun
8	Majalah Perencanaan	Tahun 2015-2018
9	Simpul Jaringan Geospasial Provinsi Riau	Up date Setiap Tahun

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Riau

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan BAPPEDA Provinsi Riau

Dari hasil analisis terhadap Renstra Kemen PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Riau pada lima tahun mendatang (hasil analisis terlampir), Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan BAPPEDA Provinsi Riau yaitu :

1. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan pembangunan daerah
2. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik karena pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal;
3. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan;
4. Ego sektoral dari instansi terkait di luar lingkup Bappeda terutama urusan yang bersifat concurrent;



5. Kemampuan pembiayaan pemerintah pusat serta pendapatan asli daerah yang masih belum optimal;
6. Peningkatan kapasitas aparatur perencana;
7. Arus globalisasi yang dapat berdampak negatif pada perencanaan pembangunan daerah.

Sementara untuk peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan BAPPEDA Provinsi Riau yaitu :

1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi terhadap BAPPEDA dalam melaksanakan pembangunan daerah;
2. Kebijakan otonomi daerah ;
3. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri;
4. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur seperti e-planning, e-monev, e-proc dan sebagainya;
5. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.



ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Riau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, penelitian, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan analisis dan *lesson learned* yang diperoleh dari perencanaan pembangunan Riau, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia serta penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian;
2. Terbatasnya data yang valid dan berkualitas;
3. Rendahnya penggunaan dokumen rencana tataruang dalam perumusan perencanaan kewilayahan (spasial);



4. Kurangnya koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan program pembangunan tahunan sehingga tidak tepat waktu;
5. Belum terlaksananya perencanaan dan monev secara elektronik (e-planning dan e-monev);
6. Masih kurangnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan.

Bappeda Provinsi Riau memiliki 152 orang pegawai yang terdiri dari 23 orang pejabat struktural, 129 orang staf dan belum memiliki tenaga fungsional perencana. Komposisi pegawai tersebut telah sesuai dengan beban kerja namun, dalam hal penempatan pegawai masih belum sesuai dengan kebutuhan bidang keahliannya yang memerlukan ketepatan metoda analisis, ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Demikian juga dari ketersediaan peralatan pendukung dan pengelolaan aset masih sangat terbatas sehingga dapat menghambat kinerja sesuai dengan harapan.

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan di Provinsi Riau perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik. Faktor pendorong dan penghambat secara internal kelembagaan Bappeda yang terkait dengan tujuan jangka menengah Bappeda Riau dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

*Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau
Tahun 2014-2019*



Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor yang Mempengaruhi	
	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)
Terbatasnya kualitas sumber daya manusia	Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas Pemberian • penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja
Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia	Belum tertatanya sistem pengelolaan aset dengan baik	Memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal
Kurangnya koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan program pembangunan tahunan sehingga tidak tepat waktu	Belum Optimalnya Peran aktif dari SKPD terhadap perencanaan	Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan program pembangunan Riau yang lebih baik
Belum terlaksananya perencanaan secara e-planning	Aplikasi perencanaan yang belum ada	Keterbukaan informasi dan komunikasi
Belum sinergisnya perencanaan sesuai dengan potensi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan sumberdaya alam yang masih belum tepat guna • Masih kurangnya aparatur di bidang penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasi potensi unggulan daerah yang sangat memadai • Terpetakan potensi pengembangan kewilayahan
Belum Optimalnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal perencanaan sering tidak tepat waktu • Hasil Monitoring dan Evaluasi belum dijadikan pedoman dalam perencanaan yang akan datang 	Ketersedianya media komunikasi elektronik yang dapat diakses kapan saja
Terbatasnya data yang valid dan berkualitas	Koordinasi dengan stakeholders di bidang data masih kurang	Adanya keinginan bersama antar SKPD dan pihak terkait dalam penyeragaman data

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi Bappeda Provinsi Riau tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Provinsi Riau yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Bappeda Provinsi Riau. Dengan



demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 (sesuai UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025) merupakan kristalisasi komitmen dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat Riau sebagaimana dinyatakan dalam Visi Riau 2020 (sesuai Perda No. 36 Tahun 2001) yang relevan untuk melandasi pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yakni :

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020”

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau di atas, maka Kepala Daerah menyusun visi pembangunan jangka menengah lima tahunan kedua yang ditetapkan sebagai Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014–2019 yaitu:

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Riau dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di tingkat nasional, regional, maupun global. Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan
4. Menurunkan Kemiskinan
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya



6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa serta pemantapan stabilitas politik
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan
8. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata
9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.

Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Riau, dapat dilihat bahwa peran dan tugas BAPPEDA sangat krusial dan esensial dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut. Selanjutnya terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dianalisis faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda Provinsi Riau terhadap pencapaian visi dan misi tersebut seperti pada tabel berikut ini :



Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Provinsi Riau
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2014-2019

Misi dan Program Gubernur	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur; 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan; 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan; 4. Menurunkan Kemiskinan 5. Mewujudkan Pemerintahan Handal dan Terpercaya (Handal); 6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa serta pemantapan stabilitas politik; 7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan; 8. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata; 9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.	1. Belum tercapainya tujuan, target, dan sasaran pembangunan Provinsi Riau yang jelas dan terukur; 2. Belum optimalnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam menyusun dokumen rencana daerah; 3. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan belum maksimal; 4. Belum Konsisten dan terkaitnya antara pencapaian tujuan Provinsi Riau dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapatnya kewenangan penanganan urusan pemerintahan yang tumpang tindih; • Persoalan pembangunan cross cutting issue belum tertangani secara jelas; • Dokumen rencana pembangunan Daerah belum diacu secara konsisten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja; • Kuantitas SDM aparatur tingkat Provinsi dan Kab/Kota cukup memadai.

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Sesuai pedoman yang diatur dalam Permendagri No. 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa penyusunan Renstra SKPD perlu memperhatikan Renstra Kementerian dan Lembaga. Untuk itu renstra Bappeda perlu melakukan



sinkronisasi dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas menetapkan dua tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: Terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan empat faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja. Beberapa sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

1. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:
 - Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN;
 - Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP.
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Terlaksananya Penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan Pembangunan Nasional” adalah: persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden.

Sasaran dalam Renstra Bappeda juga memiliki tujuan untuk pencapaian visi misi pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sasaran Renstra Bappenas. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dari sisi pelayanan Bappeda dijelaskan dalam Tabel 3.3 berikut ini:



Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra K/L
dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Sasaran Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Riau dan Bappeda Kabupaten Kota	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 2. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN; 3. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP.	1. Dokumen Perencanaan RPJP, RPJM, Renstra dan RKP belum dijadikan sebagai dasar perencanaan pengembangan antar daerah; 2. Penyusunan RPJMN belum mengakomodasi aspirasi/kebutuhan Provinsi Riau;	1. Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan; 2. Kurangnya koordinasi dengan daerah pada saat Penyusunan Prioritas Nasional; 3. Program/kegiatan yang ada dalam RKP tidak dapat menampung aspirasi Daerah.	- Akuntabilitas kinerja Pemerintah dapat diukur dengan baik dan sesuai dengan rencana; - Program/kegiatan yang diusulkan di sesuaikan kewenangan masing-masing; - Potensi SDA Riau sangat mendukung dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.

Sumber : Renstra Kemen PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Kab/Kota

Sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut tentu perlu mendapat dukungan dari daerah untuk dapat mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Demikian juga dengan Renstra Bappeda Provinsi Riau harus memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Provinsi Riau pertama kali menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Tahun 1991 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Riau melalui Perda Nomor 10 Tahun 1994, dengan masa berlaku selama 15 tahun yakni tahun 1994 hingga tahun 2009. Dengan terbitnya Undang-Undang Penataan Ruang dan adanya pemekaran Provinsi Riau dengan Provinsi



Kepulauan Riau menyebabkan terjadinya perubahan pola dan struktur ruang Provinsi Riau, sehingga diperlukan revisi terhadap Perda Tata Ruang tersebut. Meski RTRW Propinsi Riau 1994-2009 telah habis masa berlakunya, namun hingga sekarang revisi RTRW Propinsi Riau masih dalam proses penyelesaian dikarenakan belum diperolehnya persetujuan perubahan pola ruang kehutanan dari Menteri Kehutanan RI. Meskipun demikian, perencanaan pembangunan wilayah Provinsi Riau telah diselaraskan dengan rancangan RTRW dimaksud, dimana aspek struktur dan pola ruang telah mengacu pada RTRW Nasional dan RTR Pulau Sumatera.

Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. Melalui instrumen ini pula maka daya dukung lingkungan dari suatu wilayah menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam rangka perwujudan wilayah Provinsi Riau sebagai pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan skala pelayanan yang diharapkan.

Dalam rancangan RTRW Provinsi Riau 2014-2033, telah dirumuskan rencana sistem perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Selain itu juga telah ditetapkan beberapa kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kabupaten/kota yang dalam upaya perwujudannya memerlukan perhatian khusus, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.



Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Pekanbaru-Dumai diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Belum terintegrasinya perencanaan antar pemerintah pusat dan daerah.	Perubahan RTRW Provinsi Riau belum mendapat persetujuan kementerian kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Posisi strategis yang berada di tengah pulau Sumatera dan jalur pelayaran internasional Selat Malaka sebagai pusat perdagangan dan industri hasil olahan sektor perkebunan dan kehutanan serta hasil galian minyak bumi dari Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir.
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) diarahkan pada setiap ibukota Kabupaten, meliputi Bangkinang, Pasir Pangairan, Bagan Siapi-api, Pangkalan Kerinci, Teluk Kuantan, Bengkalis, Siak Sri Indrapura, Rengat, dan Tembilahan. Sedangkan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) diarahkan pada Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton.	Belum optimalnya perencanaan kewilayahan terpadu	Kualitas aparatur perencana belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pemerintah kabupaten serta sebagai kawasan pengembangan industri, pariwisata, kehutanan, perkebunan dan pertanian dan pertambangan.
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diarahkan pada Ujung Tanjung; Ujung Batu, Sungai Pakning, Bagan Batu, Duri, Perawang, Air Molek, Sungai Guntung, Sungai Apit, dan Pulau Kijang.	Tidak optimalnya koordinasi antar SKPD/Instansi sehingga kesesuaian rencana dengan implementasi masih rendah.	Hasil pengendalian dan evaluasi penataan ruang kurang berkontribusi sebagai acuan perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi sebagai kawasan pengembangan permukiman, industri perkebunan, pertambangan dan migas, pertanian, perikanan, pariwisata serta pusat perdagangan dan jasa.
Kawasan strategis propinsi, meliputi Kawasan Strategis Duri - Dumai - Rupa, Selat Panjang dan sekitarnya, Kuala Enok, Kawasan Industri Tenayan, Kawasan Industri Tanjung Buton, Kawasan Istana Siak Sri Indrapura dan sekitarnya, Kawasan Candi Muara Takus dan sekitarnya, Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang.	Belum optimalnya perencanaan kewilayahan terpadu	Kualitas aparatur perencana belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan ini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Sumber : Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Riau

Berdasarkan tabel diatas upaya pengendalian pembangunan dan berbagai dampaknya perlu diselenggarakan secara terpadu lintas sektor dan lintas



wilayah melalui instrumen penataan ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Program dan rekomendasi yang dihasilkan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Provinsi Riau telah dilakukan terhadap indikasi kebijakan dan rencana program sebagaimana berikut (tabel terlampir) :

1. Penataan Ruang Kawasan Perbatasan-Darat Wilayah Provinsi Riau bertujuan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan darat dengan provinsi berbatasan;
2. Penataan Ruang Kawasan Pesisir dan Lautan Wilayah Provinsi Riau dengan tujuan meningkatkan pengelolaan pengembangan & pemanfaatan berbagai potensi SDA pesisir & lautan wilayah Riau sebagai sektor unggulan yg diprioritaskan secara nasional;
3. Penataan Ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Provinsi Riau dengan tujuan memperbaiki kualitas ekosistem DAS untuk mencegah/mengurangi terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan untuk menjaga fungsi hidroorologis tanah guna menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Mendukung terwujudnya visi Riau Hijau;
4. Penataan Kawasan Perbatasan Antar Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Riau bertujuan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penataan ruang dan penanganan berbagai permasalahan kawasan perbatasan antar kabupaten/kota;
5. Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Wilayah Provinsi Riau dengan tujuan penyiapan rencana-rencana umum dan studi kelayakan pengembangan berbagai prasarana dan sarana dasar wilayah sebagai persiapan awal pelaksanaan pembangunan fisik, dan sebagai wahana koordinasi di antara pembina prasarana dan sarana;
6. Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Ruas-ruas Jalan Arteri Primer bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan ruas-ruas jalan Arteri Primer



- eksisting yang memiliki arti penting dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah;
7. Pembangunan Baru Jalan dan Jembatan pada Ruas-ruas Jalan Arteri Primer bertujuan membuka akses ke kawasan-kawasan potensial baru dan atau menyediakan alternatif jalur lalu-lintas cepat yang baru ke lokasi-lokasi penting/strategis;
 8. Peningkatan Jalan dan Jembatan pada ruas-ruas Jalan Kolektor Primer bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan ruas-ruas jalan Kolektor Primer eksisting yang memiliki arti penting dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah;
 9. Pembangunan Baru Jalan dan Jembatan pada Ruas-ruas Jalan Kolektor Primer bertujuan membuka akses ke kawasan-kawasan potensial baru dan atau menyediakan alternatif jalur lalu-lintas kecepatan sedang yang baru ke lokasi-lokasi penting/strategis;
 10. Pengembangan Sistem Interkoneksi Penyediaan Energi Listrik Wilayah Riau bertujuan menyiapkan rencana-rencana umum dan studi kelayakan pengembangan prasarana dan sarana penyediaan energi listrik secara terpadu;
 11. Pemutakhiran dan Pengembangan Basis Data (Data Base) Geospasial dengan tujuan tersedianya berbagai informasi keruangan yang lebih mutakhir dan lengkap bagi keperluan perencanaan tata ruang dan pelaksanaan program-program pengembangan wilayah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD dan dari hasil nilai skala kriteria terhadap isu strategis (data terlampir), maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:



1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi demi menghasilkan informasi dan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi;
3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang, urusan dan lintas sector demi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
4. Optimalisasi kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas;
5. Konsistensi antar dokumen perencanaan;
6. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel.



VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda Provinsi Riau

4.1.1 Visi Bappeda

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Riau ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan di daerah untuk mendukung perencanaan nasional, dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus memperhatikan visi Gubernur dan dikaitkan dengan RPJMD Riau periode 2014-2019. Melalui penyusunan rencana pembangunan daerah, Bappeda harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2014-2019 dan RKPD. Hal ini juga berlaku bagi SKPD lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga), maupun Provinsi dan Kabupaten Kota (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD).



Apabila keseluruhan hal tersebut dapat diimplementasikan maka Bappeda Provinsi Riau telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, Visi dan Misi RPJMD 2014-2018. Berdasarkan hasil dari perumusan visi (perumusan terlampir), maka dapat dirumuskan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau yaitu :

“Mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Riau Yang Berkualitas melalui Lembaga Perencana yang Profesional dan Berintegritas”

Penjelasan Visi:

Sebagai Satuan Kerja perencanaan yang ditugaskan serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang, maka pengertian kata berkualitas, Profesional dan Berintegritas adalah sebagai berikut:

1. **Berkualitas** adalah tersusunnya rencana pembangunan yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan kebutuhan lokal atau akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, dan akomodatif terhadap dinamika perkembangan global.
2. **Profesional** menggambarkan kinerja yang berorientasi pada hasil dan dengan menjaga kaidah-kaidah proses dalam sebuah kerangka organisasi perencanaan yang modern.
3. **Integritas** menunjukkan sebuah sikap yang berpegang teguh pada nilai-nilai yang benar dan teguh sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.



4.1.2 Misi Bappeda

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dan berdasarkan perumusan misi (perumusan terlampir), dapat dituangkan melalui 3 (tiga) Misi sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana serta kapasitas kelembagaan menuju lembaga perencana yang profesional;
3. Peningkatan pengelolaan data perencanaan yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Dalam mencapai misi tersebut, maka diperlukan upaya yang optimal dari setiap aparatur BAPPEDA Provinsi Riau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Riau

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang;
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana;
3. Meningkatkan sistem pengelolaan data, statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

Untuk tercapainya tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke -				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
			Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
			Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
		Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	6 kebijakan perencanaan	6 kebijakan perencanaan	6 kebijakan perencanaan	6 kebijakan perencanaan	6 kebijakan perencanaan
2.	Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	218 orang	250 orang	270 orang	293 orang	293 orang
3.	Meningkatkan sistem pengelolaan data, statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line/elektronik.	Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	9 data dasar	9 data dasar	9 data dasar	9 data dasar	9 data dasar



Dari tabel diatas dapat dilihat indikator-indikator pengukuran capaian sasaran dan tujuan jangka menengah SKPD. Agar lebih memudahkan pelaksanaan evaluasi dan pencapaian indikator tersebut, perlu dijelaskan formulasi perhitungan dari masing-masing indikator. Adapaun formulasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 4.2
Formulasi dan Perhitungan Indikator

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	KET
1.	meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD	$\frac{PPAS}{RKPD} \times 100 \%$	
		Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	$\frac{RKPD}{RPJMD} \times 100 \%$	
		Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD	$\frac{RENJA\ SKPD}{RENSTRA\ SKPD} \times 100 \%$	
2.	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen, laporan yang dapat dijadikan kebijakan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	
3.	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Jumlah aparatur perencana yang memiliki sertifikasi perencanaan dan jabatan struktural	
4.	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line/elektronik.	Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Jumlah data dasar elektornik maupun non elektronik sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	

4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Riau

Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Bappeda dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Riau. Berdasarkan



identifikasi peluang dan tantangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk matriks SWOT.

Tabel 4.3 : Matrik SWOT

Analisis Lingkungan Eksternal	Peluang (Opportunity - O)	Tantangan (Threat - T)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD provinsi terhadap BAPPEDA dalam melaksanakan pembangunan daerah 2. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri 3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur 4. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan perdagangan bebas Asean Economic Community dan ACFTA 2. Menurunnya Produksi minyak Riau dan berkurangnya Dana bagi Hasil 3. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan pembangunan daerah 4. Belum sinkronnya implementasi peraturan pusat dan daerah
Analisis Lingkungan Internal		
Kekuatan (Strength - S)	Strategi S - O	Strategi S - T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas aparatur yang memadai untuk mencapai terwujudnya visi dan misi BAPPEDA 2. Sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang memadai 3. Alokasi anggaran yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana 2. peningkatan kualitas koordinasi dengan dengan para pemangku kepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 2. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan sistem perencanaan
Kelemahan (Weakness - W)	Strategi W - O	Strategi W - T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum variatif sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang 2. Sistem informasi perencanaan belum memadai dan data dan informasi yang belum akurat 3. Mekanisme dan pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan capacity building SDM perencana 2. Penguatan metodologi perumusan kebijakan dan inovasi teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan metodologi perumusan kebijakan dan inovasi teknologi 2. Mengembangkan system informasi perencanaan, tata ruang berbasis web GIS, e-planning dan e-monev

Berdasarkan analisis SWOT, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2014-2018 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.4 : Startegi dan Arah Kebijakan

VISI : "Mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Riau Yang Berkualitas melalui Lembaga Perencana yang Profesional dan Berintegritas"			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dari segi ketepatan waktu serta sinkronisasi antar dokumen perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan • Penguatan metodologi perumusan kebijakan dan inovasi teknologi • Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan sistem perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelaksanaan konsultasi publik dan Musrenbang daerah • Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan		
Misi 2 : Meningkatkan kompetensi aparatur perencana serta kapasitas kelembagaan menuju lembaga perencana yang profesional			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi aparatur perencana • Peningkatan capacity building SDM perencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional perencana • Peningkatan stratifikasi Pendidikan aparatur dalam dan luar negeri • Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan aparatur.
Misi 3 : Peningkatan pengelolaan data perencanaan yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan sistem pengelolaan data, statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line/elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; • Mengembangkan system informasi perencanaan, tata ruang berbasis web GIS, e-planning dan e-monev 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infratraktur Teknologi Informasi Tekstual dan Spasial berbasis elektronik. • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.



strategi untuk melaksanakan kebijakan dan program di atas, selain disusun dengan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga memperhatikan potensi dan permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab terdahulu dan penentuan strategi (penentuan terlampir) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana;
2. Peningkatan capacity building SDM Perencana;
3. Peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
4. Penguatan metodologi perumusan kebijakan dan inovasi teknologi;
5. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan sistem perencanaan;
6. Pengembangan sistem dan kualitas data serta informasi perencanaan pembangunan daerah;
7. Menegembangkan sistem informasi perencanaan, tata ruang berbasis web GI, e-planing, dan e-monev.



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai lembaga atau instansi perencanaan, penetapan rencana program dan kegiatan prioritas beserta indikator kinerja Bappeda disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Riau periode 2014-2019. Penetapan program-program yang termuat dalam Renstra Bappeda Provinsi Riau disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundangan terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda. Program dan kegiatan prioritas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Bappeda Provinsi Riau dalam proses perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

Adapun program-program dalam kerangka pelaksanaan Misi Renstra Bappeda 2014-2019 adalah:

1. Misi ke-1:
 - a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - c) Program Perencanaan Sosial Budaya
 - d) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
 - e) Program Kerjasama Pembangunan



- f) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
- g) Program Perencanaan Tata Ruang

2. Misi ke-2:

- a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- b) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- e) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- f) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Misi ke-3:

- a) Program Pengembangan data/informasi

Tiga Belas program tersebut dengan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) masing-masing diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bappeda Provisni Riau lima tahun ke depan. Indikator kinerja adalah suatu ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, outputs, outcomes, benefit dan impacts sesuai dengan sasaran rencana. Selain itu indikator kinerja juga berfungsi

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).



2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditunjukkan.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini.

0



Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif BAPPEDA Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	80%	23,600	82%	23,228	84%	22,615	86%	19,251	88%	19,997	88%	108,691
			Penyusunan rancangan RKPD Provinsi Riau	tersusunnya RKPD Provinsi Riau	2 dokumen	2 dokumen	700	2 dokumen	725	2 dokumen	750	2 dokumen	775	2 dokumen	800	10 dokumen	3,750
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	terselenggaranya Musrenbang RKPD	1 dokumen	1 dokumen	950	1 dokumen	975	1 dokumen	1,000	1 dokumen	1,025	1 dokumen	1,050	5 dokumen	5,000
		Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	Penyiapan Materi/Paparan/Makalah Pimpinan Terkait Perencanaan Pembangunan di Provinsi Riau	Tersusunnya Pidato, Pengarahan dan Presentasi Pimpinan Dibidang Perencanaan	48 materi	12 bln	500	12 bln	550	48 materi	605	48 materi	666	48 materi	732	240 materi	3,052.55
			Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Provinsi Riau	Terevaluasinya capaian Kinerja pada Pemerintah Provinsi Riau	1 Dokumen	1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	1,000
			Sosialisasi Sistem Perencanaan di Provinsi Riau	Tersosialisasi Sistem Perencanaan di Provinsi Riau	-	-	-	SKPD dan Kab/Kota	450	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	450
			Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Riau	Tersusunnya data dan analisa tentang evaluasi kinerja pembangunan daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	582	1 Dokumen	590	1 Dokumen	600	3 dok	1,772



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD	Sinkronisasi RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten/Kota	Tersinkronnya RKPD dan KUA/PPAS Kab/Kota dalam rangka peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi	-	12 dok	400	12 dok	600	-	-	-	-	-	-	24 dok	1,000
			Sinkronisasi RKPD Kabupaten/Kota	Tersinkronnya RKPD Kab/Kota dalam rangka peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi	-	-	-	-	12 dok	625	12 dok	650	12 dok	675	36 dok	1,950	
			Sinkronisasi dan asistensi Penyusunan dokumen perencanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan kab./kota	Terkendali dan terasistensinya penyusunan dokumen perencanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan kab./kota	-	-	-	42 SKPD / 12 Kab/Kota	500	1 keg.	550	1 keg.	600	1 keg.	650	4 keg	2,300
			Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja, Penetapan Kinerja (Penja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Terkoordinasi dan tersusunnya LAKIP Bappeda Prov. Riau, Penja Prov. Riau dan RKT Bappeda	3 dokumen	3 dokumen	250	3 dokumen	250	-	-	-	-	-	-	6 dokumen	500
		Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014-2018	Tersusunnya dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014-2018	1 dok	1 dok	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	300
			Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Riau	Terlaksananya sinkronisasi pelayanan standar pelayanan minimal di Provinsi Riau	-	-	-	SPM Provinsi Riau dan 12 Kab/Kota	400	-	-	-	-	-	-	1 dok	400
			Revisi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014-2018	Tersusunnya dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014-2018	1 dok	-	-	-	-	1 dok	200	-	-	-	-	1 dok	200



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						2014		2015		2016		2017		2018					
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD	Evaluasi Capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD Provinsi Riau Tahun 2014-2018	Tersusunnya dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Riau	-	-	-	1 dokumen	200	1 dokumen	447.2	1 dokumen	450	1 dokumen	500	4 dokumen	1,597		
			Koordinasi dan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan	Terkoordinasi dan tersusunnya Perjanjian Kinerja Prov. Riau dan RKT Bappeda	-	-	-	-	2 dokumen	250	2 dokumen	275	2 dokumen	275	2 dokumen	275	6 dokumen	800	
			Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Riau	Terkoordinasi dan tersusunnya LAKIP Bappeda Prov. Riau	-	-	-	-	1 dokumen	250	1 dokumen	275	1 dokumen	275	1 dokumen	275	3 dokumen	800	
		Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sumberdaya aparatur	Terintegrasinya perencanaan pembangunan bidang sumberdaya aparatur di Provinsi Riau	1 dok	1 dok	300	1 dok	500	1 dok	600	1 dok	700	1 dok	800	1 dok	800	5 dok	2,900
			Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Konsultasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Perencanaan Program Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-	1 lap	300	1 dok	400	1 lap	500	1 lap	600	1 lap	600	1 lap	600	5 lap	2,400
			Sinkronisasi Percepatan Program Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau	Terintegrasinya Percepatan Program Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau	-	-	-	1 dok	750	1 dok	400	1 dok	425	1 dok	450	1 dok	450	4 dok	2,025
			Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	tersusunnya KUA dan PPAS (murni dan perubahan)	4 dokumen	4 dokumen	875	4 dokumen	900	4 dokumen	925	4 dokumen	950	4 dokumen	975	4 dokumen	975	20 dokumen	4,625



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						2014		2015		2016		2017		2018					
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	tersusunnya usulan APBN, terdatanya dokumen perencanaan Kab/Kota, koordinasi dengan Pemerintah Pusat	1 dokumen	1 dokumen	950	1 dokumen	975	1 dokumen	1,000	1 dokumen	1,025	1 dokumen	1,050	6 dokumen	5,000		
			Verifikasi, Analisis dan Penyelarasan Dokumen Perencanaan RPJP dan RPJMD Kabupaten / Kota	Terkoordinasinya Verifikasi, Analisis dan Penyelarasan Dokumen Perencanaan RPJP dan RPJMD Kabupaten/Kota	-	-	-	RPJP 12 Kab/Kota RPJMD 12 Kab/Kota	565	RPJP 12 Kab/Kota RPJMD 12 Kab/Kota	635	RPJP 12 Kab/Kota RPJMD 12 Kab/Kota	650	RPJP 12 Kab/Kota RPJMD 12 Kab/Kota	650	RPJP 12 Kab/Kota RPJMD 12 Kab/Kota selama 4 thn	2,500		
			Penyusunan Prioritas dan Pagu Anggaran	tersusunnya Prioritas dan Pagu Anggaran SKPD Provinsi Riau	-	1 dok	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	150	
			Pengendalian dan Evaluasi Rencana Program dan Kegiatan Penelitian	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Rencana Program dan Kegiatan Penelitian	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	433	1 Dokumen	483	1 Dokumen	650	1 Dokumen	650	1 Dokumen	650	5 Dokumen	2,216
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Riau	1 Dokumen	1 dokumen	300	1 Dokumen	490	1 Dokumen	630	1 Dokumen	550	1 Dokumen	600	1 Dokumen	600	6 Dokumen	2,570



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD	Kajian Akademis RPJPD Provinsi Riau	Terlaksananya Kajian Akademis Perencanaan RPJPD Provinsi Riau	-	-	-	1 Dokumen	1,245	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1,245		
			KLHS Evaluasi RPJPD Provinsi Riau 2005 - 2025	Tersusunnya KLHS Evaluasi RPJPD Provinsi Riau 2005 - 2025	-	-	-	1 Dokumen	930	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	930	
			Penyusunan Revisi RPJPD Provinsi Riau	Terlaksananya Penyusunan Revisi RPJPD Provinsi Riau	-	-	-	-	-	1 Dokumen	950	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	950
			Musrenbang RPJPD Provinsi Riau	Terlaksananya Musrenbang RPJPD Provinsi Riau	1 Keg	-	-	-	-	1 Keg	980	-	-	-	-	-	2 Keg	980	
			Penetapan Peraturan Daerah Revisi RPJPD Provinsi Riau	Tersedianya Perda RPJPD Provinsi Riau	-	-	-	-	-	1 Dokumen	650	-	-	-	-	-	1 Dokumen	650	
			Sosialisasi Peraturan Daerah RPJPD Provinsi Riau	Tersosialisasinya Perda RPJPD Provinsi Riau	-	-	-	-	-	1 Keg	673	-	-	-	-	-	1 Keg	673	
			Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJP Provinsi Riau Sampai tiap tahun	Tersedianya dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	500	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	500	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPDP Persentase kesesuaian RKPDP dengan RPJMD Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD	KLHS Penyusunan RPJPD Provinsi Riau	Tersedianya KLHS Penyusunan RPJPD Provinsi Riau	-	-	-	-	1 Dokumen	980	-	-	-	-	1 Dokumen	980	
			Review RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019	Terlaksananya Review RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	450	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	450
			revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019	Terlaksananya Revisi RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019	-	-	-	-	-	1 dok	900	-	-	-	-	1 dok	900.00
			verifikasi dokumen perencanaan Kabupaten /Kota se Provinsi Riau	Terlaksananya Verifikasi Dokumen Perencanaan Kab/Kota Se Provinsi Riau	-	4 kab/kota	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 kab/kota	300.00
			Analisa Satuan Biaya	Tersusunnya Dokumen Analisa Satuan Biaya Provinsi Riau	-	-	-	-	-	1 dok	800	1 dok	850	1 dok	850	3 dok	2,500
			Penyusunan Standarisasi Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Riau	Tersusunnya Dokumen Standarisasi tunjangan kinerja daerah Provinsi Riau	-	-	-	-	-	1 dok	650	1 dok	700	1 dok	780	3 dok	2,130
			Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau	Tersusunnya Draft Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	750.00	1 Dokumen



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD	Musrenbang RPJMD Provinsi Riau	Terlaksananya Musrenbang RPJMD Provinsi Riau 2014-2018	1 dokumen	1 dokumen	960	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	960	
			Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Riau	Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Riau	1 dokumen	1 dokumen	980	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	980
			Penetapan RPJMD Provinsi Riau	Tersedianya PERDA RPJMD Provinsi Riau 2014-2018	1 perda	1 perda	600	-	-	-	-	-	-	-	-	1 perda	600
			Sosialisasi Peraturan Daerah RPJMD Provinsi Riau	Tersosialisasi PERDA RPJMD Provinsi Riau 2014-2018	1 keg	1 keg	430	-	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	430
			Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi	Terlaksananya Koordinasi Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	400	1 Dokumen	415	1 Dokumen	512	1 Dokumen	520	1 Dokumen	525	6 Dokumen	2,372
			Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah di Provinsi Riau	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan di Provinsi Riau	1 Dokumen	1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	1 Dokumen	528	1 Dokumen	530	1 Dokumen	540	6 Dokumen	2,598
			Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya buku hasil pengendalian dan pelaporan APBD, APBN dan data rumah layak huni se-Propinsi RiauData/Informasi Pelaksanaan APBD Tahun 2014	4 Dokumen	4 Dokumen	625	4 Dokumen	650	5 Dokumen	783	5 Dokumen	790	5 Dokumen	795	27 Dokumen	3,643



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD	Pengendalian Pelaporan Inpres No. 3 Tahun 2010 di Provinsi Riau	Dokumen Pelaporan Inpres No. 3 Tahun 2010	1 dokumen	1 dokumen	250	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	250	
			Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJP Provinsi Riau Sampai tahun 2014	terevaluasinya dokumen RPJP Provinsi Riau setengah periode berjalan terhadap target capaian yang telah ditetapkan di RPJP Provinsi Riau	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	500	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	500
			Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Provinsi Riau	Tersedianya data dan informasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur Provinsi Riau	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	350	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	350
			Updating sistem aplikasi pelaporan APBD lingkup Bappeda Provinsi Riau	Terupdatenya sistem aplikasi pelaporan APBD Bappeda Provinsi Riau berbasis sistem Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	200	1 laporan	200	2 laporan	400	
			Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Perhubungan dan Kebinamargaan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Perhubungan dan Kebinamargaan	-	-	-	1 dok	300	1 dok	300	1 dok	300	1 dok	300	4 dok	1,200	
			Pelaksanaan Pokja RAD-GRK	Terlaksananya pelaksanaan Pokja RAD-GRK	-	-	-	1 dok	300	1 keg	300	1 keg	300	1 keg	300	4 keg	1,200	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD	Pelaksanaan Pokja Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu	Terlaksananya Pokja Cagar Biosfer Giam Siak Kecil bukit Batu	-	1 dok	300	1 dok	400	1 keg	450	1 keg	500	1 keg	500	5 keg	2,150		
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Hutan Lindung Mahato	Terlaksananya Pneyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Hutan Lindung Mahato	-	-	-	1 dok	750	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	750	
			Pneyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang	Tersedianya Pneyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang	-	-	-	1 dok	750	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	750	
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Terluar	Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Terluar	-	-	-	1 dok	1500	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	1,500	
			Koordinasi Pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau	-	-	-	1 dok	500	1 dok	500	4 dok	2,000						
			Pelaksanaan Koordinasi Program Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi Program Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau	-	1 dok	350	1 dok	375	1 dok	400	1 dok	425	1 dok	450	1 dok	450	5 dok	2,000
			Pelaksanaan Pokja AMPL Provinsi Riau	Terlaksananya Pokja AMPL Provinsi Riau	-	1 keg	350	1 dok	350	1 keg	350	1 keg	500	1 keg	500	1 keg	500	5 keg	2,050



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD	Operasional Pokja PPSP Provinsi Riau Bidang Perencanaan	Lancarnya Pelaksanaan Pokja PPSP Provinsi Riau	-	1 dok	300	1 dok	300	1 dok	300	1 dok	300	1 dok	300	4 dok	1,500	
			Penyusunan Masterplan Persampahan Provinsi Riau	Tersedianya Masterplan Pengembangan Kelistrikan dan Energi di 12 Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau	-	1 dok	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	2,500
			Penyusunan Masterplan Pengembangan Infrastruktur dan Potensi Wisata di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu	Tersedianya Masterplan Pengembangan Infrastruktur dan Potensi Wisata di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu	-	1 dok	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	1,000
			Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Ke Kab/Kota se- Provinsi Riau	Terlaksananya Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) se Provinsi Riau	-	1 keg	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	500
			Asistensi Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Riau	Terkoordinasinya Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Riau	-	1dokumen	830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1dokumen	830
			Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Riau	Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Riau	-	1 dokumen	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	1,200



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD	Studi Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan (High Grade Highway/HGH) dari Ibukota Provinsi ke Seluruh Kab/Kota Dalam Meningkatkan Konektivitas dan Mobilitas Antar Wilayah di Provinsi Riau	Terlaksananya Studi Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan (High Grade Highway/HGH) dari Ibukota Provinsi ke Seluruh Kab/Kota Dalam Meningkatkan Konektivitas dan Mobilitas Antar Wilayah di Provinsi Riau	-	1 dokumen	1750	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	1,750	
			Kajian Identifikasi Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Berdasarkan Potensi dan Kebutuhan Investasi Daerah Dalam Upaya Peningkatan Produktifitas dan Percepatan Pembangunan Wilayah di Provinsi Riau	Terlaksananya Kajian Identifikasi Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Berdasarkan Potensi dan Kebutuhan Investasi Daerah Dalam Upaya Peningkatan Produktifitas dan Percepatan Pembangunan Wilayah di Provinsi Riau	-	1 dokumen	1750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	1,750
		Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD	Pemetaan Sarana dan Prasarana Transportasi Menuju Daerah Terisolir di Provinsi riau	Tersedianya Dokument Pemetaan Sarana dan Prasarana Transportasi Menuju Daerah Terisolir di Provinsi riau	-	1 dokumen	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	500
			Penyusunan Manajemen Penanganan Jalan provinsi Riau	Tersedianya manajemen Penanganan jalan Provinsi Riau	-	-	-	1 dok	1000	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	1000



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD	Penyusunan Road Map Sanitasi	tersedianya road map sanitasi provinsi riau	-	-	-	1 dok	500	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	500		
			Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tersusunnya Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	-	1 dok	500	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	500	
			Penyusunan Data Base Sanitasi Provinsi Riau	Tersedianya Dokumen Data Base Sanitasi Provinsi Riau	-	1 dok	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	750
			Asistensi Evaluasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau	Terlaksannya Evaluasi dan Sinkronisasi Dokumen RPJMD terhadap RKPD Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau	-	-	-	-	-	1 dokumen	577	1 dokumen	530	1 dokumen	550	3 dokumen	1657		
			Asistensi review penyusunan indikator pembangunan daerah kabupaten/kota se- Provinsi Riau	Tersusunnya data dan informasi terhadap pembangunan daerah Kabupaten/Kota se-provinsi Riau	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	800	1 dokumen	825	3 dokumen	1625		
			Pembakuan dan penetapan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan Provinsi Riau	terlaksannya pembakuan dan penetapan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi riau	-	-	-	-	-	1 pergub	600	1 pergub	650	-	-	2 pergub	1250		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	PROGRAM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%	100%	2,600	100%	5,050	100%	4,150	100%	2,950	100%	3,250	100%	18,000
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1 lap	1 lap	300	1 lap	1,000	1 lap	550	1 lap	600	1 lap	650	6 lap	3,100
			Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau	Terkoordinasinya Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Riau	1 lap	1 lap	400	1 lap	750	1 lap	500	1 lap	600	1 lap	700	6 lap	2,950
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi Provinsi Riau	Terlaksananya Upaya Pencapaian target RAD Pangan dan Gizi di Provinsi Riau	1 lap	1 dok	200	1 lap	350	1 lap	400	1 lap	500	1 lap	600	6 lap	2,050
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Riau	Terkoordinasinya Perencanaan berupa Action Plan MP3EI di Provinsi Riau	1 lap	1 lap	200	1 lap	350	1 lap	400	1 lap	500	1 lap	500	6 lap	1,950
			Penyusunan Kajian Potensi dan Sinergi Mitra tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau	Tersusunnya Dokumen Potensi dan Sinergi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau	-	1 dok	600									1 dok	600



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Riau	Tersusunnya strategi pembangunan pertanian di Provinsi Riau	-	-	-	1 dok	750	-	-	-	-	-	-	1 dok	750	
			Penyusunan Kajian Potensi dan Sinergi Mitra tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau	Tersusunnya Dokumen Potensi dan Sinergi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau	-	1 dok	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	600
			Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Riau	Tersusunnya strategi pembangunan pertanian di Provinsi Riau	-	-	-	1 dok	750	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	750
			Strategi Pengembangan Peternakan di Provinsi Riau	Tersusunnya dokumen model pengembangan peternakan di Provinsi Riau	-	-	-	-	-	1 dok	750	-	-	-	-	-	1 dok	750
			Strategi Pembangunan Perikanan Berbasis Industri di Provinsi Riau	Tersusunnya strategi pembangunan perikanan berbasis industri	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	750	-	-	-	1 dok	750
			Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri UKM di Provinsi Riau	Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Industri UKM di Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	1 dok	800	-	-	-	-	1 dok	800



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan Strategi Program Peningkatan daya saing (Keunggulan Kompetitif) komunitas andalan utama sektor pertanian dalam menghadapi perdagangan global	Tersusunnya Strategi Program Peningkatan daya saing (Keunggulan Kompetitif) komunitas andalan utama sektor pertanian dalam menghadapi perdagangan global	-	-	-	-	1 dok	750	-	-	-	-	1 dok	750	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi dan Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai mitra pembangunan	1 lap	1 lap	300	1 keg	350	-	-	-	-	-	-	3 dok	650
			Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD)	Tersusunnya strategi percepatan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	800	1 dok	800	
			Strategi Penguatan Struktur Ekonomi Daerah yang berdaya saing	Tersedianya dokumen strategi penguatan struktur ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	-	1 dok	750	-	-	-	-	-	-	1 dok	750



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD)	Tersusunnya strategi percepatan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	800	1 dok	800	
			Strategi Penguatan Struktur Ekonomi Daerah yang berdaya saing	Tersedianya dokumen strategi penguatan struktur ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	1 dok	750	-	-	-	-	-	-	1 dok	750	1 dok	750
			Kajian Pengembangan Kemaritiman di Provinsi Riau	Tersedianya dokumen pengembangan kemaritiman di Provinsi Riau	-	-	-	-	1 dok	950	-	-	-	-	1 dok	950	1 dok	950
			Model pengembangan sosial ekonomi masyarakat wilayah pesisir melalui pendekatan ekonomi kelembagaan	terciptanya model pengembangan sosial ekonomi masyarakat wilayah pesisir melalui pendekatan ekonomi kelembagaan	-	-	-	-	1 dok	750	-	-	-	-	1 dok	750	1 dok	750



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Meningkatnya kualitas perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	100%	100%	600	100%	1,600	100%	1,850	100%	3,550	100%	3,050	100%	10,650	
			Valuasi ekonomi lahan gambut di Provinsi Riau	Teridentifikasinya nilai ekonomi lahan gambut di Provinsi Riau	-	1 dok	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	600
			Penyusunan Neraca Sumber daya Alam Daerah	Tersusunnya Neraca Sumberdaya Alam Daerah	-	-	-	1 dok	750	-	-	1 dok	800	-	-	2 dok	1,550	
			Evaluasi kesesuaian lahan dan pengembangan tanaman perkebunan karet di Provinsi Riau	Teridentifikasinya kesesuaian lahan dan pengembangan tanaman perkebunan karet di Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	750	1 Dok	750	
			Masterplan energi terbarukan dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah	terlaksananya energi terbarukan dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah	-	-	-	-	-	1 dok	750	-	-	-	-	1 Dok	750	
			penyusunan potensi dan pemanfaatan hutan berbasis kemasyarakatan	tersusunnya dokumen potensi dan pemanfaatan hutan berbasis kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	750	1 Dok	750	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Kajian potensi dan pemanfaatan sumberdaya air pada empat aliran sungai di Provinsi Riau	Terlaksananya Kajian Potensi dan Pemanfaatan sumberdaya air pada empat aliran sungai di Provinsi Riau	-	-	-	1 Dok	850	-	-	-	-	-	-	1 Dok	850
			Strategi pengembangan ekonomi petani perkebunan tradisional	Peningkatan kesejahteraan petani pekebun tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	500	1 Dok	500	
			Studi karakteristik dan pengelolaan air pada lahan gambut di Provinsi Riau dalam rangka pengelolaan gambut berkelanjutan	Terlaksananya studi karakteristik dan pengelolaan air pada lahan gambut di Provinsi Riau dalam rangka pengelolaan gambut berkelanjutan	-	-	-	-	-	-	1 dok	750	-	-	1 Dok	750	
			Pemanfaatan hasil limbah perkebunan di Provinsi Riau sebagai sumber energi alternatif	Termanfaatnya limbah perkebunan sebagai sumber energi terbarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	650	1 dok	650	
			Identifikasi dan pemetaan potensi energi baru dan terbarukan	teridentifikasinya potensi energi baru dan terbarukan	-	-	-	-	-	-	1 dok	800	-	-	1 dok	800	
			Penyusunan masterplan pengembangan komoditas unggulan perkebunan	tersusunnya masterplan sebagai acuan sistem pengembangan komoditas unggulan perkebunan di Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	1 dok	850	-	-	1 Dok	850	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan Master Plan Perkebunan Provinsi Riau	Terlaksananya penyusunan Master Plan Perkebunan Provinsi Riau	-	-	-	-	-	1 Dok	800	-	-	-	-	1 Dok	800
			Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi	-	-	-	-	-	1 Dok	300	1 dok	350	1 dok	400	4 dok	1,050
			PROGRAM : KERJASAMA PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas perencanaan kerjasama pembangunan	100%	100%	4200	100%	5075	100%	5350	100%	4825	100%	4850	100%	24,300
			Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Pembangunan Antar Negara	1. Peningkatan dan Pengembangan Agrowisata 2. Peningkatan dan Pengembangan Tanaman Pangan	-	-	-	1 Laporan	650	1 dok	650	1 dok	750	1 dok	750	4 dok	2,800
			Tindak Lanjut Agenda Forum Kerjasama Gubernur se-Sumatera	Terlaksananya Perencanaan Kerjasama dari forum Kerjasama Gubernur se-Sumatera	-	-	-	1 Dokumen	450	1 dok	450	1 dok	500	1 dok	500	4 dok	1,900



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Pengembangan Kerjasama Pembangunan Antara Provinsi dan Daerah	Terlaksanannya Pengembangan Kerjasama Pembangunan Antara Provinsi dengan Daerah dan antar Daerah	-	-	-	1 Dokumen	350	1 dok	350	1 dok	400	1 dok	400	4 dok	1,500	
			Fasilitasi dan Pengembangan Kerjasama Pembangunan Antara Pemerintah dengan Badan Usaha (Pihak Swasta)	Terlaksanannya Fasilitasi dan Pengembangan Kerjasama Pembangunan Antara Pemerintah dengan Badan Usaha (Pihak Swasta)	-	-	-	1 Dokumen	350	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	350
			Pengendalian dan Evaluasi Program Kerjasama Pembangunan antar Daerah, Regional dan Dunia Usaha	Terlaksanannya Pengendalian dan Evaluasi Program Kerjasama Pembangunan antar Daerah, Regional dan Dunia Usaha	-	-	-	1 Dokumen	450	1 dok	450	1 dok	550	1 dok	550	4 dok	2,000	
			Forum Perencanaan Program Kerjasama Pembangunan antar daerah	1. Terlaksanannya Forum Perencanaan Program Kerjasama Pembangunan antar daerah 2. Pembentukan Sekretariat TKKSD	-	-	-	1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	450	1 Kegiatan	450	4 keg	1,700	
			Koordinasi Kerjasama Perencanaan Pembangunan Perdesaan Provinsi Riau	Terkoordinasi Kerjasama Perencanaan Pembangunan Perdesaan Provinsi Riau	-	-	-	1 laporan	250	1 dok	250	1 dok	300	1 dok	300	4 dok	1,100	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Koordinasi kerjasama pembangunan daerah sumber daya air dan konsultasi regional operasional pemeliharaan pengairan di Provinsi Riau	terlaksananya kerjasama pembangunan daerah sumber daya air dan konsultasi regional operasional pemeliharaan pengairan di Provinsi Riau	-	1 dok	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	300
			Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Sumber Daya Air di Provinsi Riau	Rumusan Dan Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Air di Provinsi Riau	-	-	-	1 dok	325	1 dok	350	1 dok	375	1 dok	400	1 dok	1,450
			Koordinasi program Corporate Sosial Responsibility (CSR) Provinsi Riau	Terkoordinasinya program-program Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dunia Usaha Provinsi Riau	-	1 dok	350	-	-	-	-	-	-	-	-	4 dok	350
			Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah Provinsi Riau Antar Daerah dan Antar Negara	Terkoordinasinya Kerjasama Pembangunan Daerah Prov. Riau, antar Daerah dan Antar Negara	-	2 dokumen	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dok	1,200
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi dan Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai mitra pembangunan	1 lap	1 lap	300	1 keg	350	-	-	-	-	-	-	2 dok	650



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan Rencana Tindak Penanganan Kawasan Tertinggal, Terencil dan Terluar di Provinsi Riau	Terlaksananya kegiatan rencana tindak penanganan kawasan tertinggal, terencil dan terluar di Provinsi Riau	-	-	-	-	-	1 dok	950	-	-	-	-	1 dok	950		
			Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah dan Konsultasi Regional Operasi Pemeliharaan Pengairan di Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah dan Konsultasi Regional Operasi Pemeliharaan Pengairan di Provinsi Riau	-	1 dok	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	300
			Peningkatan Kerjasama Fasilitas dan Fungsi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu	Terlaksananya Kerjasama Fasilitas dan Fungsi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu	-	1 dok	1000	1 dok	1500	1 dok	1500	5 dok	7,000						
			Pemetaan Sinkronisasi Desa Model Binaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dengan Program Pemerintah	Terlaksananya Pemetaan Sinkronisasi Desa Model Binaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dengan Program Pemerintah	-	1 dok	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	PROGRAM : PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA - KOTA MENENGAH DAN BESAR	Meningkatnya kualitas perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	100%	100%	600	100%	650	100%	350	100%	375	100%	400	100%	2,375
			Pelaksanaan Koordinasi Program PNPMP Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi Program PNPMP Provinsi Riau	-	-	-	-	1 dok	350	1 dok	375	1 dok	400	3 dok	1,125	
			Pelaksanaan Koordinasi Program PAMSIMAS Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi Program PAMSIMAS Provinsi Riau	-	1 dok	300	1 dok	325	1 dok	350	1 dok	375	1 dok	400	5 dok	1,750
			Pelaksanaan Koordinasi Program RIS-PNPM Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi Program RIS-PNPM Provinsi Riau	-	1 dok	300	1 dok	325	-	-	-	-	-	-	2 dok	625
			PROGRAM : PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Meningkatnya kualitas perencanaan Bidang Sosial Budaya	100%	100%	2,020	100%	2,900	100%	4,200	100%	3,550	100%	5,350	100%	18,020
			Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau	Terwujudnya Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau	7 Kab/Kota	12 Kab/Kota	400	12 Kab/Kota	450	12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	550	12 Kab/Kota	600	12 Kab/Kota selama 5 tahun	2,500



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						2014		2015		2016		2017		2018					
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial budaya	1 dokumen	1 dokumen	300	12 Kab/Kota	500	1 dokumen	600	1 dokumen	650	1 dokumen	700	5 dokumen	2,750		
			Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan dan Target MDGs Provinsi Riau	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan dan Target MDGs Provinsi Riau	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	600	12 Kab/Kota	500	-	-	-	-	-	-	-	12 Kab/Kota selama 2 tahun	1,100	
			Evaluasi Pencapaian Tujuan dan Target MDGs Provinsi Riau	Jumlah laporan hasil Evaluasi Pencapaian Tujuan dan Target MDG's Provinsi Riau	-	-	-	1 dok	350	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	350
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pasca MDGs 2015	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pasca MDG's 2015	-	-	-	-	-	12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	600	12 Kab/Kota	700	12 Kab/Kota	700	12 Kab/Kota selama 3 tahun	1,800
			Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Terkendalnya Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Riau	3 Kab/Kota	5 Kab/Kota	400	7 Kab/Kota	450	9 Kab/Kota	550	11 Kab/Kota	650	12 Kab/Kota	700	12 Kab/Kota	700	12 Kab/Kota selama 5 tahun	2,750
			Pengendalian Pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia di Prov. Riau	Terkendalnya Pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia di Prov. Riau	-	12 Kab/Kota	320	12 Kab/Kota	350	12 Kab/Kota	400	12 Kab/Kota	450	12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota selama 5 tahun	2,020



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Akselerasi Pencapaian Program Kependudukan dan KB di Provinsi Riau	Terlaksananya koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Dalam Rangka Pengendalian Kependudukan dan KB di Provinsi Riau	-	-	-	60 Orang	300	60 Orang	350	60 Orang	400	60 Orang	450	240 Orang	1,500
			Penyusunan Profil Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Riau	-	-	-	-	100 dok	600	-	-	100 dok	800	200 dok	1,400	
			Pemetaan Permasalahan Masyarakat Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pemetaan Permasalahan Masyarakat Provinsi Riau	-	-	-	-	100 dok	500	-	-	100 dok	600	200 dok	1,100	
			Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Unggulan Pariwisata di Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Unggulan Pariwisata di Provinsi Riau	-	-	-	-	1 dok	200	1 dok	250	1 dok	300	3 dokumen	750	
			PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Meningkatnya kualitas perencanaan Tata Ruang	-	-	-	-	100%	5,700.0	100%	3,250.0	100%	1,750.0	100%	13,700.0	
			Penyusunan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau	Tersusunnya Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau	-	1 keg	1,500	1 keg	1,500	-	-	-	-	-	-	2 keg	3,000



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan dan koordinasi peraturan daerah RTRW Provinsi Riau	Tersusunnya Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau	-	-	-	-	1 keg	1500	1 keg	500	1 keg	500	3 keg	2,500	
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kuala enok - Pulau Burung	Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kuala enok - Pulau Burung	-	-	-	-	1 dok	750	-	-	-	-	1 dok	750	
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Industri Tenayan	Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Industri Tenayan	-	-	-	-	1 dok	750	-	-	-	-	1 dok	750	
			Pengendalian dan Monev pemanfaatan ruang	terlaksananya pengendalian dan monev pemanfaatan ruang	-	-	-	-	1 dok	1500	-	-	-	-	1 dok	1,500	
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Tanjung Buton	Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Tanjung Buton	-	-	-	-	-	-	1 dok	750	-	-	1 dok	750	
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Selat Panjang dan Sekitarnya	Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Selat Panjang dan Sekitarnya	-	-	-	-	-	-	1 dok	750	-	-	1 dok	750	
			Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan	Tersusunnya masterplan pengembangan kawasan	-	-	-	-	1 dok	1,200	1 dok	1,250	1 dok	1,250	3 dokumen	3,700	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	70%	246.2	72%	150.0	74%	200	76%	225.0	78%	250.0	78%	1,071.2
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Formal Selama 12 Bulan	-	75 org	246.2	25 org	150	30 org	200	35 org	225	35 org	250	152 org	1,071.2
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin aparatur	-	80%	316.75	82%	1,060.00	84%	1,166.00	86%	1,282.60	88%	1,410.86	88%	5,236.21
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai Bappeda Prov. Riau	-	-	-	170 stel	180	170 stel	198	170 stel	217.8	170 stel	239.58	850 stel	835.38
			Pengadaan pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI untuk pegawai Bappeda Prov. Riau	-	-	-	170 stel	180	170 stel	198	170 stel	217.8	170 stel	239.58	850 stel	835.38
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya batik melayu riau untuk pegawai Bappeda Provinsi Riau	-	170 stel	166.75	170 stel	180	170 stel	198	170 stel	217.8	170 stel	239.58	850 stel	1,002.13



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Pengadaan pakaian Olahraga dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian Olahraga untuk pegawai Bappeda Prov. Riau	-	-	-	170 stel	180	170 stel	198	170 stel	217.8	170 stel	239.58	850 stel	835.38
			Pengadaan pakaian Melayu dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian Melayu untuk pegawai Bappeda Prov. Riau	-	-	-	170 stel	180	170 stel	198	170 stel	217.8	170 stel	239.58	850 stel	835.38
			Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Tersedianya Sarana Kesehatan Jasmani dan Rohani Pegawai	-	12 bln	150	12 bln	160	12 bln	176	12 bln	193.6	12 bln	212.96	12 bln selama 5 kali	892.56
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kelancaran administrasi Bappeda Provinsi Riau	100%	100%	9,085	100%	9,121	100%	11,319	100%	12,642	100%	14,127	100%	56,294
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Untuk 12 Bulan	12 bln	12 bln	153	12 bln	168.3	4200 surat	185.13	4200 surat	203.643	4200 surat	224.0073	21000 surat	934.0803
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Selama 12 Bulan	12 bln	12 bln	786	12 bln	864.6	telepon/12 bln, listrik/12 bln, internet/12 bln	951.06	telepon/12 bln, listrik/12 bln, internet/12 bln	1046.166	telepon/12 bln, listrik/12 bln, internet/12 bln	1150.7826	telepon/60 bln, listrik/60 bln, internet/60 bln	4,798.6086



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 SKPD	1 SKPD	395	1 SKPD	434.5	160 unit, 3 kali dalam 12 bln	477.95	160 unit, 3 kali dalam 12 bln	525.745	160 unit, 3 kali dalam 12 bln	578.3195	2400 unit yg diservis	2,411.5145
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional 12 Bulan	12 bln	12 bln	565.6	12 bln	622.16	20 unit, 4 kali dalam 12 bln	684.376	20 unit, 4 kali dalam 12 bln	752.8136	20 unit, 4 kali dalam 12 bln	828.09469	400 unit yg diservis	3,453.04429
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Kebersihan dan Kesehatan Pegawai	12 bln	12 bln	567.07	12 bln	652.13	1 gedung & lingkungan dalam 12 bln	686.151675	1 gedung & lingkungan dalam 12 bln	754.766843	1 gedung & lingkungan dalam 12 bln	830.243527	1 gedung & lingkungan dalam 5 thn	3,490.362045
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Untuk Kantor Bappeda	1 SKPD	1 SKPD	199.5	1 SKPD	219.45	233 unit, 3 kali dlm 12 bln	241.395	233 unit, 3 kali dlm 12 bln	265.5345	233 unit, 3 kali dlm 12 bln	292.08795	3495 unit yg diservis	1,217.96745
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Selama 12 Bulan	12 bln	12 bln	200	12 bln	220	kertas 500 rim, toner 150 bh, map/amplop 200 pak, alat tulis/penghapus 250 kota, alat penjepit 150 kotak, dlm 12 bln	242	kertas 500 rim, toner 150 bh, map/amplop 200 pak, alat tulis/penghapus 250 kota, alat penjepit 150 kotak, dlm 12 bln	266.2	kertas 500 rim, toner 150 bh, map/amplop 200 pak, alat tulis/penghapus 250 kota, alat penjepit 150 kotak, dlm 12 bln	292.82	kertas 2500 rim, toner 750 bh, map/amplop 1000 pak, alat tulis/penghapus 1250 kota, alat penjepit 750 kotak	1,221.02



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	12 bln	12 bln	477.5	12 bln	525.26	577.78347	635.561817	cetak banko/ kop/ amplop 3000 blok/ rim/ lbr, cetak map 2000 bh, cetak spanduk 500 m, penggandaan 900000 lbr, penjiilidan 3800 bh dlm 12 bln	cetak banko/ kop/ amplop 3000 blok/ rim/ lbr, cetak map 2000 bh, cetak spanduk 500 m, penggandaan 900000 lbr, penjiilidan 3800 bh dlm 12 bln	cetak banko/ kop/ amplop 15000 blok/ rim/ lbr, cetak map 10000 bh, cetak spanduk 2500 m, penggandaan 4500000 lbr, penjiilidan 19000 bh	2,915.230286		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik Untuk Kantor	komponen alat-alat listrik 1105 bh, BBM genset 5600 ltr, dlm 12 bln	12 bln	624.6	12 bln	687.005	755.7055	831.27605	komponen alat-alat listrik 1105 bh, BBM genset 5600 ltr, dlm 12 bln	komponen alat-alat listrik 1105 bh, BBM genset 5600 ltr, dlm 12 bln	komponen alat-alat listrik 5525 bh, BBM genset 28000 ltr	3,812.940205		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Kinerja Pegawai Kantor Bappeda	1 SKPD	1 SKPD	776.8	1 SKPD	854.48	939.928	1033.9208	60 unit dlm 12 bln	60 unit dlm 12 bln	300 unit	4,742.44168		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Untuk Pegawai	1 SKPD	1 SKPD	185	1 SKPD	203.5	223.85	246.235	15 surat kbr, buku peraturan perundangan 242 bh dlm 12 bln	15 surat kbr, buku peraturan perundangan 242 bh dlm 12 bln	75 surat kbr, buku peraturan perundangan 1210 bh	1,129.4435		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum Selama 12 Bulan	12 bln	12 bln	400	12 bln	440	makanan 12000 porsi, snack 8000 porsi dlm 12 bln	484	makanan 12000 porsi, snack 8000 porsi dlm 12 bln	532.4	makanan 12000 porsi, snack 8000 porsi dlm 12 bln	585.64	makanan 60000 porsi, snack 40000 porsi	2,442.04
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Selama 12 Bulan	155 org	155 org	2,900	155 org	2335	155 org	3835.25	155 org	4410.5375	155 org	5072.118125	775 org	18,552.905625
			Penyediaan Jasa Admistrasi Kantor	Tertatanya administrasi kepegawaian dengan baik dan benar di Bappeda Prov. Riau	1 keg	1 keg	147.05	1 keg	150	1 keg	177.9305	1 keg	195.72355	1 keg	215.295905	5 keg	885.999955
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kantor yang aman dan kondusif	1 keg	1 keg	450	1 keg	495	1 gedung & lingkungan dalam 12 bln	544.5	1 gedung & lingkungan dalam 12 bln	598.95	1 gedung & lingkungan dalam 12 bln	658.845	1 gedung & lingkungan dlm 5 thn	2,747.295
			Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan kehumasan SKPD	Terkelolanya kehumasan Bappeda Prov. Riau dengan baik dan benar serta Kesekretariatan PPID Bappeda Prov. Riau	1 keg	1 kegiatan	257.54	1 keg	250	1 kegiatan	311.627998	1 kegiatan	342.790798	1 kegiatan	377.069878	5 keg	1,539.028674



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Ketersediaan sarana dan prasarana Bappeda Provinsi Riau	85%	87%	5,258.8	89%	3,144.6	91%	3,217.1	92%	6,999.4	93%	7,699.3	93%	26,319
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Bappeda Prov. Riau	1 SKPD	1 SKPD	589.5	1 SKPD	648.45	1 keg	713.295	1 keg	784.6245	1 keg	863.08695	5 keg	3,598.95645
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Kinerja Pegawai	1 SKPD	1 SKPD	600	1 SKPD	660	1 keg	726	1 keg	798.6	1 keg	878.46	5 keg	3,663.06
			Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair Perlengkapan Gedung Kantor Bappeda Prov. Riau	1 SKPD	1 SKPD	227	1 SKPD	249.7	1 keg	274.67	1 keg	302.137	1 keg	332.3507	5 keg	1,385.8577
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor Untuk Bappeda Selama 12 Bulan	12 bln	12 bln	200	12 bln	220	12 bln	242	12 bln	266.2	12 bln	292.82	60 bln	1,221.02
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan Perawatan Kendaraan Dinas	12 bln	12 bln	228	12 bln	250.8	12 bln	275.88	12 bln	303.468	12 bln	333.8148	60 bln	1,391.9628



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Targ et	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Targ et	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Targ et	Rp (juta)	Targ et	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bln	12 bln	419.25	12 bln	461.175	12 bln	507.2925	12 bln	558.02175	12 bln	613.823925	60 bln	2,559.563175
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bln	12 bln	200	12 bln	220	-	-	12 bln	266.2	12 bln	292.82	60 bln	979.02
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bln	12 bln	200	12 bln	220	12 bln	242	12 bln	266.2	12 bln	292.82	60 bln	1,221.02
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	12 bln	12 bln	195	12 bln	214.5	12 bln	235.95	12 bln	259.545	12 bln	285.4995	60 bln	1,190.4945
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terehabnya gedung kantor	1 gedung	1 gedung	2,400	-	-	-	-	1 gedung	3194.4	1 gedung	3513.84	1 gedung selama 5 tahun	9,108.24



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya capaian laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	12,780.65	100%	21,229.94	100%	33,061.29	100%	20,120.69	100%	28,801.58	100%	115,994
			Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD Bappeda Provinsi Riau Tahun 2015 sesuai peraturan dan perundang-undangan	1 dok	1 dok	150	1 dok	175	1 dok	200	1 dok	225	1 dok	250	5 dok	1,000
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun TA. 2013	1 laporan	1 laporan	82.25	1 laporan	90	1 laporan	99	1 laporan	108.9	1 laporan	119.79	5 laporan	499.94
			PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAA N PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	75%	77%	3,255.85	79%	4,825.00	81%	4,736.15	82%	4,255.90	83%	3,705.90	83%	20,779
			Sosialisasi PP 46 Tahun 2010 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS	Tersosialisasinya dan terlaksananya penilaian prestasi kerja PNS	-	155 org	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 org



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan	Meningkatnya kompetensi aparatur perencanaan	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Aparatur Perencana	Meningkatnya Kemampuan Teknis perencana dalam berbahasa asing	-	25 org	200	25 orang	250	-	-	-	-	-	-	50 org	450	
			Pelatihan Aplikasi Sistem Pelaporan e-Monev PP 39 Tahun 2006	Terlaksananya pelatihan aplikasi e-Monev terhadap aparatur Pemerintah Daerah yang menangani pelaporan APBN di Kab/Kota se-Provinsi Riau	-	25 org	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 org	500
			Asistensi Pemantapan Pelaporan e-Monev	Terlaksananya fasilitasi dan penerapan sistem aplikasi e-monev PP 39 Tahun 2006 melalui pelatihan tenaga pengelola pelaporan PP 39 e-monev Tahun 2006	-	-	-	1 laporan dan tenaga teknis 65 org	500	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan dan tenaga teknis 65 org	500
			Pembuatan sistem aplikasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	tersedianya sistem aplikasi e-monev pembangunan daerah	-	-	-	-	-	1 sistem	746	-	-	-	-	-	1 sistem	746
			Pembuatan sistem aplikasi pelaporan APBD lingkup Bappeda Provinsi Riau	terlaksananya pelaporan APBD Bappeda Provinsi Riau berbasis sistem aplikasi	-	-	-	-	-	-	1 sistem	200	-	-	-	-	1 sistem	200



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Meningkatnya Kemampuan Teknis Aparat Perencana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	125 org	-	-	25 orang	1,150	-	-	-	-	-	150 org	1,150	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana	Meningkatnya Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana	20 org	-	-	20 orang	1,350	-	-	-	-	-	40 org	1,350	
			Inhouse Training Pemantapan Kapasitas aparatur Bappeda Provinsi Riau	Meningkatkan kapasitas aparatur Bappeda Provinsi Riau dalam menjalankan Tupoksi	-	-	-	45%	450	50 org	500	50 org	500	50 org	500	150 org	1,950
			Peningkatan Kemampuan Penyusunan Dokumen Perencana	Meningkatnya Kemampuan Teknis perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan	-	-	-	20 orang	300	30 orang	550	30 orang	650	30 orang	700	110 org	2,200
			Penerapan, Evaluasi dan Audit ISO 9001:2008 Bappeda Provinsi Riau	Terimplementasi Sistem Manajemen Mutu 9001:2008 Bappeda Provinsi Riau	-	1 dok	493.85	1 dok	200	1 dok	325	1 dok	350	1 dok	350	5 dok	1,719
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Provinsi Riau dan Kab/Kota se- Provinsi Riau	Meningkatkan kapasitas dan motivasi aparatur perencana Prov. Riau dan Kab/Kota se- Provinsi Riau (2 angkatan)	-	24 org	450									24 org	450



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Peningkatan Jaringan Intranet di Bappeda Prov. Riau	tersedianya jaringan internet di Bappeda Prov. Riau	1 kegiatan	1 kegiatan	875	1 kegiatan	625	1 kegiatan	725	1 kegiatan	550	1 kegiatan	575	5 kegiatan	3,350
			Upgrade Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau	upgrade Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau	-	-	-	-	1 sistem	390.147	1 sistem	380.897	1 sistem	380.897	3x sistem	1,152	
			Bimbingan Teknis Pengisian Lembar Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Gender Analisis Pathway (GAP) bagi Focal Point Provinsi Riau	Terlatihnya Kapasitas Focal Point SKPD Provinsi Riau dalam Pengisian Lembar Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Gender Analisis Pathway (GAP) sebanyak 100 orang	-	1 keg	600	-	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	600
			Bimtek penyusunan neraca sumber daya alam daerah	terlaksananya bimtek penyusunan neraca sumber daya alam	-	-	-	-	-	1 lap	300	-	-	-	-	1 lap	300
			workshop peningkatan kapasitas pejabat fungsional perencana	meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis pejabat fungsional perencana	-	-	-	-	-	30 org	300	30 org	350	30 org	400	90 org	1,050



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Diklat penilaian angka kredit jabatan fungsional perencana	tersedianya tim penilaian angka kredit jabatan fungsional perencana	-	-	-	-	-	-	20 org	700	-	-	20 org	-	
			Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada statistik Sosial Sosial	terlatihnya SDM pada statistik Sosial Sosial	-	-	-	-	30 org	200	30 org	200	30 org	200	90 org	600	
			Penyusunan Sistem Manjemen Kepegawaian Bappeda Provinsi Riau	Tersedianya sistem manajemen kepegawaian Bappeda Provinsi Riau	-	-	-	-	1 sistem	200	-	-	-	-	1 sistem	200	
			Upgrade manajemen kepegawaian Bappeda Provinsi Riau	tersedianya laporan administrasi kepegawaian Bappeda Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	1 laporan	225	1 laporan	250	2 laporan	475	
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur jabatan fungsional perencana Provinsi Riau	Meningkatnya pengetahuan kapasitas pejabat fungsional perencana	-	-	-	-	30 org	300	30 org	350	30 org	350	90 org	1,000	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Meningkatkan sistem pengelolaan data, statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line/elektronik.	Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	PROGRAM : PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI	ketersediaan data elektronik maupun non elektronik sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	17 jumlah data	17 jumlah data	3,093	16 jumlah data	5,745	18 jumlah data	8,495	17 jumlah data	5,750	17 jumlah data	7,385	80 jumlah data	30,468
			Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Untuk Mendukung Penyusunan RKPD Provinsi Riau	Tersedianya Dokumen Data dan Informasi untuk Mendukung Penyusunan RKPD Provinsi Riau	1 Dokumen	1 Dokumen	321.5	1 Dokumen	350	1 Dokumen	370	1 Dokumen	385	1 Dokumen	400	5 Dokumen	1,826.5
			Penyusunan data statistik Provinsi Riau	Tersedianya Data/Informasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	6 Dokumen	800	6 Dokumen	975	6 Dokumen	920	6 Dokumen	920	6 Dokumen	930	30 Dokumen	4,545
			Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Terlaksananya Pelaksanaan terhadap pelaksanaan pada kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	500	1 Dokumen	510	1 Dokumen	520	1 Dokumen	530	4 Dokumen	2,060
			Pengadaan Aplikasi Data Based Bidang Sosial Budaya	Tersusunnya Data based/ Data Spasial Bidang Sosial Budaya	-	-	-	-	-	1 aplikasi	2000	-	-	-	-	1 aplikasi	2000
			Updating dan Maintenance Data Based Bidang Sosial Budaya	Terupdatenya data base bidang sosial	-	-	-	-	-	1 dok	350	1 dok	350	1 dok	350	3 dok	1,050
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
Meningkatkan sistem pengelolaan data, statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line/elektronik.	Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Penyusunan Data Spasial Informasi Pembangunan Provinsi Riau	Terpetakannya Data dan Informasi tentang Pembangunan Provinsi Riau	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	525	1 Dokumen	550	1 Dokumen	575	1 Dokumen	600	4 Dokumen	2,250		
			Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Untuk Mendukung Penyusunan RPJMD Provinsi Riau	Tersedianya Dokumen Data dan Informasi untuk Mendukung Penyusunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	400	1 Dokumen	400			
			Penyebarluasan Informasi melalui media online tentang data perencanaan statistik Provinsi Riau	Tersedianya Informasi Mengenai data perencanaan Statistik Provinsi Riau melalui media online	-	1 Dokumen	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	200
			Penayangan visualisasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau melalui media TV online	Terlaksananya Penayangan visualisasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau melalui media TV online	-	1 keg	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	200
			Penguatan Pusat Data Spasial Provinsi Riau Penunjang Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Pesisir dan Laut	Terkelolanya Data Spasial SDA pesisir melalui web GIS Badan Informasi GeoSpasial dan Tersedianya SDM pengelola data spasial di Provinsi Riau	-	1 lap	200	1 lap	500	1 dok	500	1 dok	600	1 dok	650	5 dok	2,450		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Meningkatkan sistem pengelolaan data, statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line/elektronik.	Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Penyusunan Sistem Informasi Spasial SDA di Provinsi Riau	Terbangunnya sistem informasi SDA berbasis Spasial/lokasio nal	-	-	-	-	1 Dok	850	-	-	-	-	1 Dok	850	
			Penerbitan Majalah Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Riau	terbitnya majalah perencanaan pembangunan daerah	2 edisi	-	2 edisi	475	2 edisi	500	2 edisi	525	2 edisi	550	8 edisi	2,050	
			Penyediaan Buku Agenda dan kalender Bappeda	tersedianya buku agenda dan kalender Bappeda	2 (buku agenda & kalender)	2 (buku agenda & kalender)	250	2 (buku agenda & kalender)	275	2 (buku agenda & kalender)	300	2 (buku agenda & kalender)	325	2 (buku agenda & kalender)	350	10 (5 buku agenda & kalender)	1,500
			Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan	Terlaksananya Keikutsertaan Dalam Pameran Riau Expo dan Pameran Tingkat Nasional	1 pameran	1 pameran	400	1 pameran	400	1 pameran	410	1 pameran	475	1 pameran	500	5 kali pameran	2,185
			Pengelolaan Perpustakaan Bappeda Provinsi Riau	Terlaksananya penataan perpustakaan Bappeda Prov. Riau	1 keg	1 keg	261.9	1 keg	270	1 keg	285	1 keg	275	1 keg	275	5 keg	1,367
			Pengelolaan Simpul Jaringan Geospasial Provinsi Riau	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Geospasial Provinsi Riau	-	1 lap	350	1 dok	350	1 lap	350	1 lap	350	1 lap	350	5 lap	1,750



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
Meningkatkan sistem pengelolaan data, statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line/elektronik.	Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Pengembangan informasi rencana pembangunan daerah Provinsi Riau melalui media cetak	Terlaksananya Pengembangan informasi rencana pembangunan daerah Provinsi Riau melalui media cetak	-	1 keg	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	110
			Penyusunan Data dan Informasi Objek Kerjasama Pembangunan antar daerah dan Provinsi Riau	Tersediannya data dan informasi Objek Kerjasama Pembangunan antar daerah dan Provinsi Riau	-	-	-	1 buku data	350	1 dok	350	1 dok	450	1 dok	450	4 dok	1,600
			Pengumpulan Data dan Informasi Penyusunan RPJP Provinsi Riau	Terlaksananya Penyusunan Revisi RPJPD Provinsi Riau	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	750.00	1 Dokumen	750
			Pembangunan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau	upgrade Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau	1 sistem	-	-	1 sistem	774.972	-	-	-	-	-	-	1 sistem	775
			Penyusunan Buku Saku Profil Pembangunan Sosial Budaya dan Permasalahan Masyarakat Provinsi Riau	Jumlah Buku Saku Profil Pembangunan Sosial Budaya dan Permasalahan Masyarakat Provinsi Riau	-	-	-	-	-	100 buku	250	-	-	100 buku	300	200 buku	550



INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI RIAU MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI RIAU 2014-2019

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja BAPPEDA untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi BAPPEDA Provinsi Riau, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan BAPPEDA, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja BAPPEDA kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) BAPPEDA Provinsi itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014–2019. Adapun Tujuan dan sasaran RPJMD yang di dukung pencapaiannya oleh indikator kinerja Bappeda Provinsi Riau adalah sebagai berikut :



Misi 5 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya	
Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah	Membaiknya kinerja pengelolaan keuangan
	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja BAPPEDA Provinsi Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2014–2019 dapat diuraikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPDP	-	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %
2	Persentase kesesuaian RKPDP dengan RPJMD	-	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %
3	Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD	-	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %



Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BAPPEDA dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi BAPPEDA Provinsi Riau yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur BAPPEDA Provinsi Riau, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau ini dapat dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan -tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.



Tantangan dan Peluang Pelayanan di Bappeda Provinsi Riau

Analisis Terhadap Renstra Kemen PPN/Bappenas dan Kemendagri serta Renstra Bappeda Kabupaten/Kota

Tabel 1.

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Riau terhadap Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten/Kota dan Renstra Kemendagri serta Kemen PPN/Bappenas

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Riau	Sasaran pada Renstra Bappeda Kabupaten/Kota*)	Sasaran pada Renstra Kemen PPN/Bappenas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan sektoral dan tahunan daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang berlaku	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tepat waktu	Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas	
2	Terkoordinasinya perencanaan disetiap urusan pembangunan (persentase kegiatan yang mengacu pada RKP)	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinkron, serasi dan energi			
3	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Bappeda	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kemampuan teknis aparatur perencana	Tersedianya ketatalaksanaan (SOP) untuk mendukung pelaksanaan tupoksi		
4	Terjaminnya pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Bappeda				
5	Terjaminnya proses administrasi pelayanan Bappeda				
6	Peserta diklat pejenjangan				
7	Peserta diklat perencanaan pembangunan daerah				
8	Aparatur bersertifikasi pengadaan barang dan jasa				
9	Aparatur pengolah data statistik				
10	Peserta diklat substansi lainnya				
11	Tersedianya dokumen : riau dalam angka, profil daerah, PDRB, info eks, Data dan statistik perencanaan pembangunan		Menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan	- Tersedianya data perencanaan yang akurat sesuai isu-isu strategis daerah - Tersedianya data statistik Pembangunan daerah	
12	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan		Tersedianya data/informasi dan tindak lanjut hasil monitoring		
13	Meningkatnya hasil evaluasi program sharing budget setiap tahun anggaran	Meningkatnya hasil penelitian dan koordinasi pembangunan antar daerah dan antar negara			
14	Meningkatnya hasil kerjasama pembangunan				
15	Jumlah penelitian dalam rangka perencanaan pembangunan daerah				

Sumber : Revisi Renstra Bappeda 2009-2013, Renstra Kemen PPN/Bappenas, dan Renstra Bappeda Kab/Kota



Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Tabel 2.
Hasil Telaahan Struktur dan Pola Ruang Wilayah Propinsi Riau terhadap Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Riau

No.	Rencana Pola dan Struktur Ruang	Struktur dan Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur dan Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pekanbaru-Dumai diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Masih belum ditetapkan dan disahkannya Perda tentang RTRW Propinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Pembangunan daerah • Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi • Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam • Program Kerjasama Pembangunan • Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar 	Penetapan Revisi Perda RTRW Propinsi Riau agar dapat menjadi salah satu pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah	
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) diarahkan pada setiap ibukota Kabupaten, meliputi Bangkinang, Pasir Pangairan, Bagan Siapi-api, Pangkalan Kerinci, Teluk Kuantan, Bengkalis, Siak Sri Indrapura, Rengat, dan Tembilahan. Sedangkan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) diarahkan pada Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton.				
3	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diarahkan pada Ujung Tanjung; Ujung Batu, Sungai Pakning, Bagan Batu, Duri, Perawang, Air Molek, Sungai Guntung, Sungai Apit, dan Pulau Kijang.				
4	Kawasan strategis propinsi, meliputi Kawasan Strategis Duri - Dumai - Rupa, Selat Panjang dan sekitarnya, Kuala Enok, Kawasan Industri Tenayan, Kawasan Industri Tanjung Buton, Kawasan Istana Siak Sri Indrapura dan sekitarnya, Kawasan Candi Muara Takus dan sekitarnya, Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang.				



Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sesuai dengan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau

Tabel 3.
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Riau
Terhadap Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Riau

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Bappeda Provinsi Riau	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Riau
(2)	(3)	(4)	(5)
indikasi kebijakan dan rencana program penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Ruang Kawasan Perbatasan-Darat Wilayah Provinsi Riau • Penataan Ruang Kawasan Pesisir dan Lautan Wilayah Provinsi Riau • Penataan Ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Provinsi Riau • Penataan Kawasan Perbatasan Antar Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Riau • Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Wilayah Provinsi Riau • Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Ruas-ruas Jalan Arteri Primer • Pembangunan Baru Jalan dan Jembatan pada Ruas-ruas Jln Arteri Primer • Peningkatan Jalan dan Jembatan pada ruas-ruas Jalan Kolektor Primer • Pembangunan Baru Jalan dan Jembatan pada Ruas-ruas Jalan Kolektor Primer • Pengembangan Sistem Interkoneksi Penyediaan Energi Listrik Wilayah Riau • Pemutakhiran dan Pengembangan Basis Data (Data Base) Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 		<ul style="list-style-type: none"> • koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan darat dengan provinsi berbatasan; • meningkatkan pengelolaan pengemb & pemanfaatan berbagai potensi SDA pesisir & lautan wilayah Riau sebagai sektor unggulan yg diprioritaskan secara nasional; • memperbaiki kualitas ekosistem DAS untuk mencegah/mengurangi terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan untuk menjaga fungsi hidroorologis tanah guna menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Mendukung terwujudnya visi Riau Hijau; • koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penataan ruang dan penanganan berbagai permasalahan kawasan perbatasan antar kabupaten/kota; • penyiapan rencana-rencana umum dan studi kelayakan pengembangan berbagai prasarana dan sarana dasar wilayah sebagai persiapan awal pelaksanaan pembangunan fisik, dan sebagai wahana koordinasi di antara pembina prasarana dan sarana; • meningkatkan kapasitas pelayanan ruas-ruas jalan Arteri Primer eksisting yang memiliki arti penting



Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Bappeda Provinsi Riau	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Riau
(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • membuka akses ke kawasan-kawasan potensial baru dan atau menyediakan alternatif jalur lalu-lintas cepat yang baru ke lokasi-lokasi penting/strategis; • meningkatkan kapasitas pelayanan ruas-ruas jalan Kolektor Primer eksisting yang memiliki arti penting dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah; • membuka akses ke kawasan-kawasan potensial baru dan atau menyediakan alternatif jalur lalu-lintas kecepatan sedang yang baru ke lokasi-lokasi penting/strategis; • penyiapan rencana-rencana umum dan studi kelayakan pengembangan prasarana dan sarana penyediaan energi listrik secara terpadu; • Tersedianya berbagai data pokok tata ruang wilayah yang lebih mutakhir dan lengkap bagi keperluan perencanaan tata ruang dan pelaksanaan program-program pengembangan wilayah.

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Ranperda RTRW Provinsi Riau



Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Riau

Tabel 4.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau
			INTERNAL	EKSTERNAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum sinkronnya dokumen perencanaan masih belum optimalnya pembinaan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan sulitnya koordinasi dengan SKPD lainnya masih belum lengkap sarana dan sarana pendukung belum adanya aparatur fungsional perencana Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan daerah 	-	<ul style="list-style-type: none"> Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan Belum tertatanya sistem pengelolaan aset dengan baik Sistem Teknologi Informasi dan data elektronik yang belum memadai Masih kurangnya aparatur di bidang penelitian Jadwal perencanaan sering tidak tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan aparatur perencana di SKPD lain masih rendah dominasi politik masih Rendahnya Pendapatan Daerah Rendahnya Peran serta Swasta dalam pembangunan daerah Masih belum optimalnya ketersediaan data terhadap penetapan kebijakan pembangunan Peran aktif dari SKPD terhadap perencanaan masih kurang Pemanfaatan sumberdaya alam yang masih belum tepat guna Koordinasi dengan stakeholders di bidang data masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia Kurangnya koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan program pembangunan tahunan sehingga tidak tepat waktu Belum terlaksananya perencanaan secara e-planning Belum sinergisnya perencanaan sesuai dengan potensi daerah Masih kurangnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan Terbatasnya data yang valid dan berkualitas
Analisis Renstra Kemen PPN/ Bappenas serta Bappeda Kab/kota	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan belum optimalnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan 	-	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan; Kurangnya koordinasi dengan daerah pada saat Penyusunan Prioritas Nasional; Program/kegiatan yang ada dalam 	<ul style="list-style-type: none"> regulasi terkait perencanaan pembangunan antara kemendagri dan Bappenas perkembangan teknologi informasi yang menunjang perencanaan pembangunan masih belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Perencanaan RPJP, RPJM, Renstra dan RKP belum dijadikan sebagai dasar perencanaan pengembangan antar daerah; Penyusunan RPJMN belum mengakomodasi aspirasi/kebutuhan Provinsi Riau;



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau
			INTERNAL	EKSTERNAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			RKP tidak dapat menampung aspirasi Daerah.		<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada standar pelayanan minimal pada urusan perencanaan pembangunan
Telaahan RTRW	Belum selesainya Revisi Perda RTRW Provinsi Riau	-	Keterlibatan BAPPEDA dalam penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Landasan Hukum UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang sehingga mengharuskan revisi perda RTRW; • Belum adanya kesekepatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kementerian Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya acuan dari dokumen penataan ruang terhadap perencanaan pembangunan daerah • Belum teritegrasinya perencanaan antar pemerintah pusat dan daerah • Belum optimalnya perencanaan kewilayahan terpadu • Tidak optimalnya koordinasi antar SKPD/Instansi sehingga kesesuaian rencana dengan implementasi masih rendah
Analisis KLHS	<ul style="list-style-type: none"> • belum optimalnya pemanfaatan daya dukung lingkungan hidup untuk pembangunan • masih terjadinya resiko lingkungan dikarenakan pembangunan 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan SKPD terkait tentang optimalisasi pemanfaatan lingkungan hidup • Koordinasi dengan SKPD terkait terhadap pencegahan dampak resiko pembangunan terhadap leingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan oleh perusahaan perkebunan • pemahaman masyarakat terhadap pelestarian lingkungan 	Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi terhadap kelestarian lingkungan



Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Tabel 5.
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Isu Strategis			
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(2)	(3)	(4)	(5)
<ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi • Perubahan arus globalisasi yang cepat • Peran swasta dan masyarakat internasional • Kesepakatan peningkatan kesejahteraan masyarakat internasional melalui Program MDGs 	<ul style="list-style-type: none"> • regulasi terkait perencanaan pembangunan antara kemandagri dan Bappenas • perkembangan teknologi informasi yang menunjang perencanaan pembangunan masih belum optimal • Padu serasi revisi perda RTRW Provinsi Riau yang belum selesai oleh kementerian kehutanan • Belum adanya penetapan standar pelayanan minimal untuk urusan perencanaan pembangunan • Adanya Kebijakan nasional peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa Program MDGs, Pengentasan Kemiskinan, dan Pemberdayaan Masyarakat • Masih kurangnya asupan data dan informasi nasional sebagai penunjang pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan aparatur perencana di SKPD lain masih rendah • dominasi politik • masih Rendahnya Pendapatan Daerah • Rendahnya Peran serta Swasta dalam pembangunan daerah • Masih belum optimalnya ketersediaan data terhadap penetapan kebijakan pembangunan • Peran aktif dari SKPD terhadap perncanaan masih kurang • Pemanfaatan sumberdaya alam yang masih belum tepat guna • Koordinasi dengan stakeholders di bidang data masih kurang 	



Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Tabel 6.
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Provinsi Riau
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
 Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2014-2019

Misi dan Program Gubernur	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Visi: <i>Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur</i>			
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur; 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan; 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan; 4. Menurunkan Kemiskinan 5. Mewujudkan Pemerintahan Yang Terpercaya (Handal); 6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa serta pemantapan stabilitas politik; 7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan; 8. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata; 9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.	1. Belum tercapainya tujuan, target, dan sasaran pembangunan Provinsi Riau yang jelas dan terukur; 2. Belum optimalnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam menyusun dokumen rencana daerah; 3. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan belum maksimal; 4. Belum Konsisten dan terkaitnya antara pencapaian tujuan Provinsi Riau dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapatnya kewenangan penanganan urusan pemerintahan; • Persoalan pembangunan cross cutting issue belum tertangani secara jelas; • Dokumen rencana pembangunan Daerah belum diacu secara konsisten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa peraturan perundang-undangan mengamankan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja; • Kuantitas SDM aparatur tingkat Provinsi dan Kab/Kota cukup memadai.

Sumber : RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019



Telaahan Renstra Kemen PPN/Bappenas serta Renstra Bappeda Kab/Kota

Tabel7.
Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau
berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas dan kemendagri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran dan tujuan Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 2. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN; 3. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP. 4. tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Perencanaan RPJP, RPJM, Renstra dan RKP belum dijadikan sebagai dasar perencanaan pengembangan antar daerah; • Penyusunan RPJMN belum mengakomodasi aspirasi/kebutuhan Provinsi Riau; 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan; • Kurangnya koordinasi dengan daerah pada saat Penyusunan Prioritas Nasional; • Program/kegiatan yang ada dalam RKP tidak dapat menampung aspirasi Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas kinerja Pemerintah dapat diukur dengan baik dan sesuai dengan rencana; • Program/kegiatan yang diusulkan di sesuaikan kewenangan masing-masing; • Potensi SDA Riau sangat mendukung dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.



Tabel 8.
Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya data statistik dan perencanaan yang akurat sesuai isu-isu strategis daerah	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum optimalnya koodinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah belum optimalnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan masih belum optimalnya ketersediaan data dan informasi tentang pembangunan daerah belum optimalnya perencanaan dengan menggunakan sistem (<i>e-planing</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas aparatur yang masih rendah Kuantitas sarana dan prasarana belum tercukupi Rendahnya koordinasi dalam penyusunan database pembangunan, sehingga data di temukan masih ada perbedaan untuk kondisi yang sama Belum tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan Kuantitas aparatur cukup memadai Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi guna meningkatkan kualitas data
2	Tersedianya struktur ruang, pola ruang, serta pemanfaatan ruang	belum selesainya revisi perda RTRW	Kesepakatan antara Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Riau tentang Revisi RTRW Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Landasan Hukum UU tentang penataan ruang Komitmen Pimpinan Bappeda sebagai Tim penyusun RTRW
3	Tersedianya ketatalaksanaan (SOP) untuk mendukung pelaksanaan tupoksi	belum optimalnya standar operasional prosedur kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas aparatur yang masih rendah Manajemen SDM yang belum mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai Kuantitas sarana dan prasarana belum tercukupi 	<ul style="list-style-type: none"> Landasan hukum kelembagaan cukup jelas Tersedianya ketatalaksanaan (pedoman prosedur kerja, standard oper
4	Peningkatan kualitas Pengetahuan Sumberdaya Perencana	Masih rendahnya kompetensi aparatur perencana Bappeda Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi dalam memberikan kontribusi pada kualitas aparatur Aturan yang sering berubah 	<ul style="list-style-type: none"> Kuantitas aparatur cukup memadai Anggaran yang memadai
5	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum optimalnya koodinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah belum optimalnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan belum optimalnya perencanaan dengan menggunakan sistem (<i>e-planing</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas aparatur yang masih rendah Kuantitas sarana dan prasarana belum tercukupi Masih rendahnya koordinasi dengan SKPD dalam perencanaan pembangunan Belum tersedianya sistem informasi dan data perencanaan pembangunan yang memadai Dinamika Politik Masih Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan Kuantitas aparatur cukup memadai Komitmen pimpinan



Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 9.

Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekanbaru-Dumai diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). 2. Bengkalis sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bersama Kuala Enok, Ujung Tanjung, Pasir Pangaraian, Siak Sri Indrapura, Bengkalis – Buruk Bakul dan Rengat – Pematang Reba. 3. Bagan Siapi-api memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kab. Rokan Hilir yang ditunjang oleh keberadaan PKW Ujung Tanjung dan PKL Bagan Batu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasinya perencanaan antar pemerintah pusat dan daerah. • Belum optimalnya perencanaan kewilayahan terpadu • Tidak optimalnya koordinasi antar SKPD/Instansi sehingga kesesuaian rencana dengan implementasi masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan RTRW Provinsi belum mendapat persetujuan kementerian kehutanan • Kualitas aparatur perencana belum memadai • Hasil pengendalian dan evaluasi penataan ruang kurang berkontribusi sebagai acuan perencanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Posisi strategis yang berada di tengah pulau Sumatera dan jalur pelayaran internasional Selat Malaka sebagai pusat perdagangan dan industri hasil olahan sektor kehutanan berupa paper dan pulp yang cukup besar serta hasil galian minyak bumi dari wilayah Duri dan Rokan Hilir. • Potensi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pemerintah kabupaten serta sebagai kawasan industri, pariwisata, kehutanan, perkebunan dan pertanian dan pertambangan. • Potensi sebagai kawasan industri perkebunan, pertambangan dan migas, pertanian, perikanan, pariwisata serta pusat perdagangan dan jasa.



Tabel 10.
Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau berdasarkan Analisis KLHS
berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Bappeda	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
<ul style="list-style-type: none"> • koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan darat dengan provinsi berbatasan; • meningkatkan pengelolaan pengemb & pemanfaatan berbagai potensi SDA pesisir & lautan wilayah Riau sebagai sektor unggulan yg diprioritaskan secara nasional; • memperbaiki kualitas ekosistem DAS untuk mencegah/mengurangi terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan untuk menjaga fungsi hidroorologis tanah guna menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Mendukung terwujudnya visi Riau Hijau; • koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penataan ruang dan penanganan berbagai permasalahan kawasan perbatasan antar kabupaten/kota; • penyiapan rencana-rencana umum dan studi kelayakan pengembangan berbagai prasarana dan sarana dasar wilayah sebagai persiapan awal pelaksanaan pembangunan fisik, dan sebagai wahana koordinasi di antara pembina prasarana dan sarana; • meningkatkan kapasitas pelayanan ruas-ruas jalan Arteri Primer eksisting yang memiliki arti penting dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah; • membuka akses ke kawasan-kawasan potensial baru dan atau menyediakan alternatif jalur lalu-lintas cepat yang baru ke lokasi-lokasi penting/strategis; • meningkatkan kapasitas pelayanan ruas-ruas jalan Kolektor Primer eksisting yang memiliki arti penting dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah; • membuka akses ke kawasan-kawasan potensial baru dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasinya perencanaan antar pemerintah pusat dan daerah. • Belum optimalnya perencanaan kewilayahan terpadu • Tidak optimalnya koordinasi antar SKPD/Instansi sehingga kesesuaian rencana dengan implementasi masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan RTRW Provinsi belum mendapat persetujuan kementerian kehutanan • Kualitas aparatur perencana belum memadai • Hasil pengendalian dan evaluasi penataan ruang kurang berkontribusi sebagai acuan perencanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Posisi strategis yang berada di tengah pulau Sumatera dan jalur pelayaran internasional Selat Malaka sebagai pusat perdagangan dan industri hasil olahan sektor kehutanan berupa paper dan pulp yang cukup besar serta hasil galian minyak bumi dari wilayah Duri dan Rokan Hilir. • Potensi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pemerintah kabupaten serta sebagai kawasan industri, pariwisata, kehutanan, perkebunan dan pertanian dan pertambangan. • Potensi sebagai kawasan industri perkebunan, pertambangan dan migas, pertanian, perikanan, pariwisata serta pusat perdagangan dan jasa.



<p>atau menyediakan alternatif jalur lalu-lintas kecepatan sedang yang baru ke lokasi-lokasi penting/strategis;</p> <ul style="list-style-type: none"> • penyiapan rencana-rencana umum dan studi kelayakan pengembangan prasarana dan sarana penyediaan energi listrik secara terpadu; • Tersedianya berbagai data pokok tata ruang wilayah yang lebih mutakhir dan lengkap bagi keperluan perencanaan tata ruang dan pelaksanaan program-program pengembangan wilayah. 			
--	--	--	--



Penentuan Isu-isu Strategis

Tabel 11.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
	Total	100

Tabel 12.

Skor Penilaian

No	Kriteria*)	Nilai
1	Tinggi	3
2	Sedang	2
3	Rendah	1

Tabel 13.

Skor Penetapan isu strategis

No	Index skor	Penetapan Isu
1	>0.18	Strategis
2	>0.11 dan <0.18	Sedang
3	<0.18	Tidak

Tabel 14.

Nilai Skala Kriteria terhadap isu strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-										Total Skor	Isu Strategis
		1		2		3		4		5			
		nilai	Rata2	nilai	Rata2	nilai	Rata2	nilai	Rata2	nilai	Rata2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pemanfaatan arus globalisasi dan informasi demi peningkatan perencanaan pembangunan	2	0.08	1	0.04	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0.087	
2	Optimalisasi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah demi kelancaran perencanaan pembangunan daerah	1	0.04	1	0.04	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0.08	
3	Pemanfaatan	2	0.08	1	0.04	3	0.15	1	0.1	2	0.4	0.128	



	SDA yang mengacu pada kelestarian lingkungan dan antisipasi masalah sosial												
4	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang, urusan dan lintas sektor demi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	3	0.12	3	0.12	3	0.15	3	0.3	3	0.6	0.22	√
5	Optimalisasi kelembagaan perencana pembangunan melalui peningkatan kapasitas	3	0.12	3	0.12	3	0.15	3	0.3	3	0.6	0.22	√
6	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah	3	0.12	3	0.12	3	0.15	3	0.3	3	0.6	0.22	√
7	Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi demi menghasilkan informasi dan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi	3	0.12	3	0.12	3	0.15	3	0.3	3	0.6	0.22	√
8	Peningkatan pembangunan di bidang sosial budaya	2	0.08	3	0.12	2	0.1	2	0.2	2	0.4	0.15	
9	Optimalisasi penggunaan anggaran melalui efisiensi dan efektifitas perencanaan	2	0.08	2	0.08	2	0.1	2	0.2	1	0.2	0.15	
10	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang demi kelancaran perencanaan pembangunan	3	0.12	2	0.08	1	0.05	2	0.2	1	0.2	0.11	
11	peningkatan	2	0.08	2	0.08	3	0.15	2	0.2	2	0.4	0.11	



	kualitas pelayanan dan perencanaan yang handal demi pemenuhan kebutuhan masyarakat masa datang												
12	Konsistensi antar dokumen perencanaan	3	0.12	3	0.12	3	0.15	3	0.3	3	0.6	0.22	√
13	Peningkatan sinergisitas dan kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah, serta pihak swasta dalam proses pembangunan	3	0.12	3	0.12	2	0.1	2	0.2	2	0.4	0.16	
14	Optimalisasi Kerjasama dengan pihak legislatif dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	3	0.12	2	0.08	2	0.1	2	0.2	2	0.4	0.15	
15	Percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau	3	0.12	3	0.12	2	0.1	2	0.2	2	0.4	0.16	
16	Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel	3	0.12	3	0.12	3	0.15	3	0.3	3	0.6	0.22	√



Visi dan Misi Bappeda Provinsi Riau

Perumusan Visi

Tabel 15.
Perumusan Perwujudan Visi

Isu Strategis	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang, urusan dan lintas sektor demi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		Optimalisasi lembaga perencana pembangunan melalui peningkatan kapasitas building		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah		Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi demi menghasilkan informasi dan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi		Konsistensi antar dokumen perencanaan		Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel	
	Permasalahan Pelayanan Bappeda											
Terbatasnya kualitas aparat Bappeda Prov. Riau	X		√	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui aparat Bappeda Provinsi Riau yang mampu menjalankan Tupoksi secara optimal	√	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui aparat Bappeda Provinsi Riau yang professional dan memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas	X		√	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui aparat yang mampu menyusun, dan menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan	√	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui aparat Bappeda Provinsi Riau yang mampu menjalankan system informasi perencanaan dengan optimal
Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia	√	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas dengan didukung sarana dan prasarana yang lengkap thdp pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan	√	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas dengan didukung sarana dan prasarana yang lengkap demi menunjang pelaksanaan tupoksi Bappeda Provinsi Riau	√	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas dengan didukung sarana dan prasarana yang lengkap demi pelaksanaan kinerja aparat Bappeda Provinsi Riau	√	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas dengan didukung sarana dan prasarana yang lengkap dalam pelaksanaan pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	X		√	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas dengan didukung Tersedianya sarana dan prasarana system informasi perencanaan
Kurangnya koordinasi dengan Pemangku kepentingan dalam penyusunan program pembangunan tahunan sehingga tidak tepat waktu	√	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan berperannya seluruh pemangku kepentingan	√	Terwujudnya rencana yang berkualitas melalui lembaga perencanaan yang terpercaya dan disegani oleh seluruh pemangku kepentingan	√	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas dengan didukung oleh aparat yang mampu berkoordinasi dengan seluruh pamangku kepentingan sehingga program pembangunan dapat tepat waktu	X		X		X	



Belum terlaksananya perencanaan secara e-planning	X		X		√	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas dengan didukung aparatur yang mampu melaksanakan perencanaan secara e-planning	X		√	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui perencanaan secara e-planning sehingga terciptanya sinkronisasi dokumen perencanaan	√	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui perencanaan berbasis e-planning
Masih kurangnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan	X		X		X		√	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas berdasarkan informasi dan data akurat yang diperoleh dari pengendalian, monitoring dan evaluasi	√	Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan dengan optimalisasi peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan	√	Terwujudnya system informasi yang transparan, akuntabel, dan aksesibel dengan optimalisasi peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan
Terbatasnya data yang valid dan berkualitas	X		X		X		√	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas berdasarkan informasi dan data akurat yang diperoleh dari pengendalian, monitoring dan evaluasi	√	Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan dengan bersumber dari data yang valid dan akurat	√	Terwujudnya sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel dengan didasarkan dari data yang valid dan akurat



Tabel 16.
Perumusan Visi

No.	Perwujudan Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui aparat Bappeda Provinsi Riau yang mampu menjalankan Tupoksi secara optimal	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui aparat perencanaan yang profesional	<p>Mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Riau Yang Berkualitas melalui Lembaga Perencana Profesional yang Berintegritas</p>
2	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui aparat Bappeda Provinsi Riau yang professional dan memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas		
3	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui aparat yang mampu menyusun, dan menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan		
4	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui aparat Bappeda Provinsi Riau yang mampu menjalankan system informasi perencanaan dengan optimal		
5	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas dengan didukung sarana dan prasarana yang lengkap demi pelaksanaan kinerja aparat Bappeda Provinsi Riau		
6	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas dengan didukung oleh aparat yang mampu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga program pembangunan dapat tepat waktu		
7	Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan dengan optimalisasi peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui dokumen perencanaan yang terintegrasi	
8	Terwujudnya rencana pembangunan berkualitas dengan didukung sarana dan prasarana yang lengkap thdp pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan		
9	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas dengan didukung sarana dan prasarana yang lengkap dalam pelaksanaan pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan		
10	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan berperannya seluruh pemangku kepentingan		
11	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas dengan didukung sarana dan prasarana yang lengkap demi menunjang pelaksanaan tupoksi Bappeda Provinsi Riau		
12	Terwujudnya rencana yang berkualitas melalui lembaga perencanaan yang terpercaya dan disegani oleh seluruh pemangku kepentingan		
13	Terwujudnya rencana		



	pembangunan yang berkualitas dengan didukung Tersedianya sarana dan prasarana system informasi perencanaan		
14	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas dengan didukung aparatur yang mampu melaksanakan perencanaan secara e-planing	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas berdasarkan data akurat dan pemakaian sistem informasi perencanaan	Mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Riau Yang Berkualitas melalui Lembaga Perencana yang Profesional dan Berintegritas
15	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui perencanaan secara e-planing sehingga terciptanya sinkronisasi dokumen perencanaan		
16	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui perencanaan berbasis e-planing		
17	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas berdasarkan informasi dan data akurat yang diperoleh dari pengendalian, monitoring dan evaluasi		
18	Terwujudnya system informasi yang transparan, akuntabel, dan aksesibel dengan optimalisasi peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan		
19	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas berdasarkan informasi dan data akurat yang diperoleh dari pengendalian, monitoring dan evaluasi		
20	Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan dengan bersumber dari data yang valid dan akurat		
21	Terwujudnya sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel dengan didasarkan dari data yang valid dan akurat		

Tabel 17.
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Riau Yang Berkualitas melalui Lembaga Perencana yang Profesional dan Berintegritas	Berkualitas	tersusunnya rencana pembangunan yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan kebutuhan lokal atau akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, dan akomodatif terhadap dinamika perkembangan global.
	Profesional	menggambarkan kinerja yang berorientasi pada hasil dan dengan menjaga kaidah-kaidah proses dalam sebuah kerangka organisasi perencanaan yang modern
	integritas	menunjukkan sebuah sikap yang berpegang teguh pada nilai-nilai yang benar dan teguh sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan publik



Perumusan Misi

Tabel 18.
Perumusan Misi

No.	Visi	Pokok-pokok visi	Misi
1	Mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Riau Yang Berkualitas melalui Lembaga Perencana yang Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui dokumen perencanaan yang terintegrasi	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
2		Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas melalui aparatur perencana yang profesional	Meningkatkan kompetensi aparatur perencana serta kapasitas kelembagaan menuju lembaga perencana yang profesional
3			
4		Terwujudnya rencana pembangunan yang berkualitas berdasarkan data akurat dan pemakaian system informasi perencanaan	Peningkatan pengelolaan data perencanaan yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi



Tabel 19.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke -				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
			Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
			Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
		Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	6 kebijakan perencanaan	6 kebijakan perencanaan	6 kebijakan perencanaan	6 kebijakan perencanaan	6 kebijakan perencanaan
2.	Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	218 orang	250 orang	270 orang	293 orang	293 orang
3.	Meningkatkan sistem pengelolaan data, statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line/elektronik.	Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	9 data dasar	9 data dasar	9 data dasar	9 data dasar	9 data dasar



Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Riau

Tabel 20.
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran Bappeda Provinsi Riau

	Peluang (Opportunity - O)	Tantangan (Threat - T)
Analisis Lingkungan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD provinsi terhadap BAPPEDA dalam melaksanakan pembangunan daerah 2. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri 3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur 4. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan perdagangan bebas Asean Economic Community dan ACFTA 2. Menurunnya Produksi minyak Riau dan berkurangnya Dana bagi Hasil 3. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan pembangunan daerah 4. Belum sinkronnya implementasi peraturan pusat dan daerah
Analisis Lingkungan Internal		
Kekuatan (Strength - S)	Strategi S - O	Strategi S - T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas aparatur yang memadai untuk mencapai terwujudnya visi dan misi BAPPEDA 2. Sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang memadai 3. Alokasi anggaran yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana 2. peningkatan kualitas koordinasi dengan dengan para pemangku kepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem dan kualitas data serta informasi perencanaan pembangunan daerah 2. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan sistem perencanaan
Kelemahan (Weakness - W)	Strategi W - O	Strategi W - T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum variatif sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang 2. Sistem informasi perencanaan belum memadai dan data dan informasi yang belum akurat 3. Mekanisme dan pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan capacity building SDM perencana 2. Penguatan metodologi perumusan kebijakan dan inovasi teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan metodologi perumusan kebijakan dan inovasi teknologi 2. Mengembangkan system informasi perencanaan, tata ruang berbasis web GIS, e-planning dan e-monev



Tabel 21.
Penentuan Strategi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	<p>persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD</p> <p>Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD</p> <p>Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan • Penguatan metodologi perumusan kebijakan dan inovasi teknologi • Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan sistem perencanaan
2	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	
3	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi aparatur perencana • Peningkatan capacity building SDM perencana
4	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line/elektronik.	Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan sistem dan kualitas data serta informasi perencanaan pembangunan daerah; • Mengembangkan system informasi perencanaan, tata ruang berbasis web GIS, e-planning dan e-monev



Tabel 22.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : “Mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Riau Yang Berkualitas melalui Lembaga Perencana yang Profesional dan Berintegritas”			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dari segi ketepatan waktu serta sinkronisasi antar dokumen perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan • Penguatan metodologi perumusan kebijakan dan inovasi teknologi • Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan sistem perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelaksanaan konsultasi publik dan Musrenbang daerah • Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
	Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan		
Misi 2 : Meningkatkan kompetensi aparatur perencana serta kapasitas kelembagaan menuju lembaga perencana yang profesional			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi aparatur perencana • Peningkatan capacity building SDM perencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional perencana • Peningkatan stratifikasi Pendidikan aparatur dalam dan luar negeri • Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan aparatur.
Misi 3 : Peningkatan pengelolaan data perencanaan yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan sistem pengelolaan data, statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line/elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; • Mengembangkan system informasi perencanaan, tata ruang berbasis web GIS, e-planning dan e-monev 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infratraktur Teknologi Informasi Tekstual dan Spasial berbasis elektronik. • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.



Tabel 23.
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase kesesuaian PPAS terhadap RKP	-	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %
2	Persentase kesesuaian RKP dengan RPJMD	-	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %
3	Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD	-	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %

